

KETAHANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2011

ISSN 0522-2572

VISI

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

MISI

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan.

NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaan.



DARMIN NASUTION

Gubernur Bank Indonesia, 2012

“Selain tumbuh lebih tinggi, pola pertumbuhan ekonomi juga lebih berimbang, ditandai dengan meningkatnya investasi dan ekspor. Peningkatan investasi tercermin dari tingginya impor barang modal, penyaluran kredit investasi, serta aliran masuk modal langsung asing (FDI). Kecenderungan peningkatan investasi mencerminkan proses akumulasi kapital, yang dapat mendorong efektivitas ekspansi kapasitas produktif perekonomian sekaligus menurunkan rigiditas (kekakuan) sisi penawaran perekonomian”.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik & Diagram	xii
Dewan Gubernur	xx
Kata Pengantar	xxii
Ringkasan Eksekutif	xxvi
Boks 1 Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2011	xli

BAGIAN 1

PENINGKATAN KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL

2

BAB I

Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Global

5

1.1	Perkembangan Ekonomi Global	8
1.2	Perkembangan Ekonomi Negara-negara Maju	11
1.3	Perkembangan Ekonomi Negara-negara <i>Emerging Markets</i>	13
1.4	Respons Kebijakan Global	14
1.5	Kerjasama Internasional	15



21 **Perkembangan Pasar Keuangan dan Pasar Komoditas Global** **BAB II**

2.1	Pasar Keuangan Global	24
2.2	Pasar Komoditas Global	29

36 **KETAHANAN MAKROEKONOMI INDONESIA** **BAGIAN 2**

39 **Pertumbuhan Ekonomi** **BAB III**

3.1	Kinerja Pertumbuhan Ekonomi	42
3.2	Permintaan Agregat	44
3.3	Penawaran Agregat	50
3.4	Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	53
Boks 3.1	Peran Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah dalam Rangka Mendukung Kegiatan Infrastruktur	56

61 **Neraca Pembayaran Indonesia** **BAB IV**

4.1	Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia	64
4.2	Transaksi Berjalan	66
4.3	Transaksi Modal dan Finansial	70
4.4	Cadangan Devisa dan Indikator Kerentanan Eksternal	73

77 **Nilai Tukar** **BAB V**

5.1	Kinerja Nilai Tukar	80
5.2	Faktor-faktor yang Memengaruhi	82
5.3	Perkembangan Pasar Valuta Asing di Domestik	85
Boks 5.1	Peran Nilai Tukar dalam Kerangka Kerja <i>Inflation Targeting</i> yang Fleksibel	87

DAFTAR ISI

BAB VI	Inflasi	91
6.1	Kinerja Inflasi	94
6.2	Faktor-faktor yang Memengaruhi	97
Boks 6.1	Penguatan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	103

BAGIAN 3

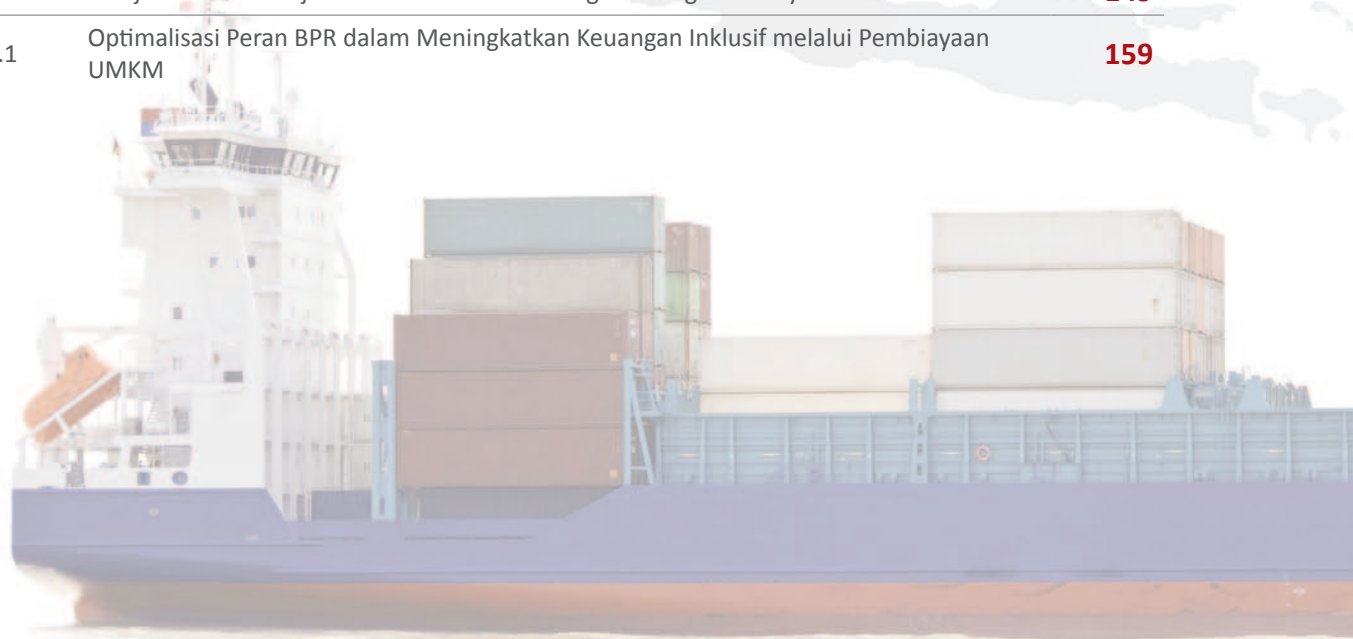
BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN	108
--	------------

BAB VII	Kebijakan Moneter Dan Makroprudensial	111
----------------	--	------------

7.1	Kebijakan Moneter	114
7.2	Kebijakan Makroprudensial	115
7.3	Komunikasi Kebijakan Moneter	123
7.4	Protokol Manajemen Krisis (PMK)	123
7.5	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moneter	124
Boks 7.1	Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia	130

BAB VIII	Kebijakan dan Kinerja Sistem Keuangan	135
-----------------	--	------------

8.1	Kebijakan dan Kinerja Perbankan	138
8.2	Kebijakan dan Kinerja Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya	149
Boks 8.1	Optimalisasi Peran BPR dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif melalui Pembiayaan UMKM	159



163 Kebijakan dan Kinerja Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang **BAB IX**

9.1	Kebijakan dan Kinerja Sistem Pembayaran	166
9.2	Kebijakan dan Kinerja Pengedaran Uang	171

179 Kebijakan Pemerintah Dan Kinerja Fiskal **BAB X**

10.1	Kebijakan dan Kinerja Fiskal	182
10.2	Kebijakan Sektoral	191

196 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN SERTA ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA **BAGIAN 4**

199 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Serta Arah Kebijakan Bank Indonesia **BAB XI**

11.1	Prospek Perekonomian 2012	202
11.2	Prospek Perekonomian 2013-2016	208
11.3	Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Bank Indonesia	212
Boks 11.1	Optimisme Peningkatan Investasi Pasca Diperolehnya Peringkat Layak Investasi (<i>Investment Grade</i>)	217

221 **LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

BAB I Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Global

Tabel 1.1	Indikator Ekonomi Utama Dunia	8
Tabel 1.2	Indikator Makro Negara PIIGS dan AS	9
Tabel 1.3	Kepemilikan Surat Utang PIIGS oleh Beberapa Negara	10
Tabel 1.4	Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Global	18

BAB II Perkembangan Pasar Keuangan dan Pasar Komoditas Global

Tabel 2.1	Dinamika Perubahan Prospek Pertumbuhan Tahun 2011	30
-----------	---	----



Tabel 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Daerah	44
Tabel 3. 3	Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	49
Tabel 3. 4	Angkatan Kerja dan Pengangguran	53
Tabel 3. 5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	54
Tabel 3. 6	Indeks Keparahan Kemiskinan	55

Tabel 4.1.	Neraca Pembayaran Indonesia	65
Tabel 4.2.	Perkembangan Ekspor	66
Tabel 4.3.	Daya Saing Komoditas Ekspor Nonmigas	68
Tabel 4.4.	Perkembangan Impor (c.i.f)	69

Tabel 5.1	<i>Sovereign Rating</i> Indonesia (Per Desember 2011)	83
-----------	---	----

Tabel 6.1.	Perkembangan Inflasi IHK Periode Prakrisis dan Pascakrisis	95
Tabel 6.2.	Perkembangan Inflasi IHK di Daerah	97
Tabel 6.3.	Sumbangan Inflasi/Deflasi Komoditas Kelompok <i>Volatile Food</i>	101

DAFTAR TABEL

BAB VIII Kebijakan dan Kinerja Sistem Keuangan

Tabel 8.1	Indikator Utama Bank Umum	143
Tabel 8.2	Indikator Utama BPR	144
Tabel 8.3	Jaringan Kantor Bank Syariah	145
Tabel 8.4	Perkembangan Aset, DPK dan Pembiayaan BUS dan UUS	145
Tabel 8.5	Perkembangan Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS	146
Tabel 8.6	Penyaluran Dana BUS dan UUS	147
Tabel 8.7	Perkembangan Kredit UMKM	148
Tabel 8.8	Kecepatan Penyesuaian Bursa di Negara-negara Kawasan	153
Tabel 8.9	Kecepatan Penyesuaian Pasar SBN	156
Tabel 8.10	Pembiayaan Ekonomi melalui Jalur Nonbank	158



Kebijakan dan Kinerja Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang

BAB IX

Tabel 9.1	Tabel Perkembangan Jenis Transaksi BI-RTGS	169
Tabel 9.2	Perkembangan Posisi UYD	173

Kebijakan Pemerintah dan Kinerja Fiskal

BAB X

Tabel 10.1	Ringkasan Operasi Keuangan Pemerintah	183
------------	---------------------------------------	-----

Prospek dan Tantangan Perekonomian Serta Arah Kebijakan Bank Indonesia

BAB XI

Tabel 11.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan	203
Tabel 11.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran	205
Tabel 11.3	Proyeksi Neraca Pembayaran Indonesia	206
Tabel 11.4	<i>Outlook</i> Ekonomi Indonesia Jangka Menengah (2011-2016)	210

DAFTAR GRAFIK & DIAGRAM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Grafik 1.	Nilai Tukar dan Inflasi Inti	xli	Grafik 3.	Perkembangan Inflasi IHK Periode Hari Raya	xli
Grafik 2.	Ekspektasi Inflasi dan BI rate	xli	Diagram 1.	Faktor-faktor yang Memengaruhi Inflasi Tahun 2011	xliii

BAB I Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Global

Grafik 1.1	Aktivitas Perdagangan Negara-negara Asia	10	Grafik 1.6	Inflasi Negara-negara Maju	13
Grafik 1.2	Aktivitas Perdagangan Negara-negara Eropa	11	Grafik 1.7	Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara <i>Emerging Markets</i>	13
Grafik 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju	12	Grafik 1.8	Inflasi Negara-negara <i>Emerging Markets</i> Asia	14
Grafik 1.4	Perkembangan Tingkat Upah di AS	12	Grafik 1.9	Perkembangan Suku Bunga Kebijakan	14
Grafik 1.5	Penjualan Eceran Negara-negara Maju	12			

Grafik 2.1	Perubahan Indeks Harga Saham 2011	24	Grafik 2.12	Selisih Suku Bunga Tertinggi – Terendah	28
Grafik 2.2	Perubahan Imbal Hasil Obligasi 2011	24	Grafik 2.13	Indeks Dolar dan Indeks Dolar Asia	29
Grafik 2.3	Volatilitas Pasar Keuangan Global	25	Grafik 2.14	Indeks Harga Komoditas Global	29
Grafik 2.4	Likuiditas Global	25	Grafik 2.15	Pertumbuhan Volume Perdagangan Global	30
Grafik 2.5	Aliran Modal ke Negara-negara Emerging Markets	25	Grafik 2.16	Perkembangan Harga Minyak	31
Grafik 2.6	CDS Negara-negara PIIGS	26	Grafik 2.17	Pasokan dan Permintaan Minyak	31
Grafik 2.7	Selisih Imbal Hasil Obligasi Pemerintah Negara-negara PIIGS vs Jerman	26	Grafik 2.18	Indeks Komoditas CRB dan Imbal Hasil US T- Bond	32
Grafik 2.8	Aliran Modal Asing di Pasar Modal Negara-negara Emerging Asia	26	Grafik 2.19	Kontrak Nonkomersial Minyak	32
Diagram 2.1	Beberapa Peristiwa pada Tahun 2011	27	Grafik 2.20	Spekulasi dan Harga Minyak	32
Grafik 2.9	Perkembangan Indeks Harga Saham Global	28	Grafik 2.21	Harga Komoditas Pertambangan	33
Grafik 2.10	Perkembangan Indeks Harga Saham Asia	28	Grafik 2.22	Harga Komoditas Pertanian	33
Grafik 2.11	Selisih LIBOR – Overnight Indexed Swap (OIS) Negara-negara Maju	28	Grafik 2.23	Harga Emas dan Pasar Keuangan	33
			Grafik 2.24	Harga Emas dan Non-commercial Contracts	33

Grafik 3. 1	Pertumbuhan PDB	42	Grafik 3. 10	Nilai Tukar Petani	46
Grafik 3. 2	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan	42	Grafik 3.11	Indeks Keyakinan Konsumen	46
Grafik 3. 3	Pertumbuhan PDB Sisi Penawaran	43	Grafik 3.12	Rasio Penduduk Usia Produktif terhadap Usia Nonproduktif	46
Grafik 3. 4	Kontribusi PDB Sisi Penawaran	43	Grafik 3. 13	Indeks Keyakinan Konsumen berdasarkan Daerah	47
Grafik 3. 5	Pangsa Daerah dalam Perekonomian Nasional	43	Grafik 3. 14	Indeks Penjualan Eceran berdasarkan Kota	47
Grafik 3.6.	Kontribusi Daerah Dalam Perekonomian Nasional	44	Grafik 3. 15	Survei Kegiatan Bisnis	47
Grafik 3.7	Pendapatan per Kapita	45	Grafik 3. 16	Investasi Bangunan dan Nonbangunan	47
Grafik 3. 8	Indeks Penghasilan Menurut Kelompok Pengeluaran	45	Grafik 3. 17	Indeks Tendensi Bisnis BPS	48
Grafik 3. 9	Perkembangan Kelas Menengah	46	Grafik 3. 18	Peringkat Utang Indonesia	48

DAFTAR GRAFIK & DIAGRAM

BAB III Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 3. 19	PMA dan PMDN	48	Grafik 3.25	Pertumbuhan Sektor Pertambangan	52
Grafik 3. 20	Ekspor Nonmigas Berdasarkan Sektor	49	Grafik 3.26	Pertumbuhan Sektor PHR	52
Grafik 3.21	Pangsa Negara Tujuan Ekspor Batubara dan CPO	50	Grafik 3.27	Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	53
Grafik 3. 22	Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang	50	Grafik 3. 28	Tingkat Pengangguran berdasarkan Daerah	53
Grafik 3.23	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	51	Grafik 3. 29	Tingkat Kemiskinan	54
Grafik 3.24	Pertumbuhan Sektor Pertanian	51	Grafik 3. 30	Tingkat Kemiskinan berdasarkan Daerah	54



Grafik 4.1.	Volume Perdagangan Dunia, Ekspor dan Harga Ekspor	64	Grafik 4.10.	Investasi Langsung Asing Menurut Negara Asal	71
Grafik 4.2.	Transaksi Berjalan	66	Grafik 4.11.	Investasi Portofolio	72
Grafik 4.3.	Indeks Harga Ekspor Indonesia	67	Grafik 4.12.	IHSG dan Posisi Kepemilikan SBI dan SUN oleh Asing	72
Grafik 4.4.	Pertumbuhan Ekspor Menurut Negara Tujuan	67	Grafik 4.13.	Kewajiban Investasi Lainnya Sektor Swasta	73
Grafik 4.5.	Impor Minyak dan Konsumsi BBM	69	Grafik 4.14.	Perkembangan Pinjaman Luar Negeri Sektor Swasta	73
Grafik 4.6.	Perkembangan Neraca Jasa	69	Grafik 4.15.	Perkembangan Cadangan Devisa	74
Grafik 4.7.	Transaksi Modal dan Finansial	70	Grafik 4.16.	Indikator Kerentanan Eksternal	74
Grafik 4.8.	Perkembangan Investasi Langsung	70			
Grafik 4.9.	Investasi Langsung Asing Menurut Sektor Ekonomi	71			

Grafik 5.1	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	80	Grafik 5.8	Premi Swap	84
Grafik 5.2	Volatilitas Nilai Tukar Rupiah	80	Grafik 5.9	<i>Uncovered Interest Parity</i> (UIP)	84
Grafik 5.3	Analisa Rangkaian Kejadian dan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	81	Grafik 5.10	<i>Covered Interest Parity</i> (CIP)	84
Grafik 5.4	Nilai Tukar terhadap Dolar AS	81	Grafik 5.11	Aliran Dana Nonresiden pada Portofolio Rupiah	85
Grafik 5.5	Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan	82	Grafik 5.12	Jatuh Tempo Kepemilikan Nonresiden di SBI	86
Grafik 5.6	Nilai Tukar Rupiah dan Ekspor Nonmigas	82	Grafik 5.13	Kepemilikan Nonresiden di SBN	86
Grafik 5.7	Indeks Risiko dan Selisih Imbal Hasil	84			

Grafik 6.1.	Analisa Rangkaian Kejadian Inflasi IHK	94	Grafik 6.7.	Inflasi Bahan Pangan Negara Kawasan	96
Grafik 6.2.	Kinerja Inflasi	94	Grafik 6.8.	Kapasitas Utilisasi	98
Grafik 6.3.	Perkembangan Inflasi	95	Grafik 6.9.	Ekspektasi Inflasi 2011	99
Grafik 6.4.	Inflasi IHK Bulanan	95	Grafik 6.10.	Ekspektasi Inflasi Pedagang- Survei Pedagang Eceran	99
Grafik 6.5.	Inflasi IHK Berdasarkan Kelompok Barang	96	Grafik 6.11.	Inflasi Beberapa Komoditas <i>Administered Prices</i>	101
Grafik 6.6.	Inflasi IHK Negara Kawasan	96	Grafik 6.12.	Inflasi <i>Volatile Food</i> dan Beras	101

DAFTAR GRAFIK & DIAGRAM

BAB VII Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

Grafik 7.1	Perubahan Kepemilikan SBN	115	Grafik 7.8	Kepemilikan Asing di SBI dan Nilai Tukar Rupiah	120
Grafik 7.2	Sumber Ekses Likuiditas	116	Grafik 7.9	Pangsa dan Posisi Kepemilikan SBI Nonresiden	120
Grafik 7.3	Frekuensi Jatuh Waktu dan Penyerapan Instrumen Operasi Moneter	117	Grafik 7.10	SBI Nonresiden yang Tersedia untuk Dijual	120
Grafik 7.4	Nominal Posisi Rata-rata Harian Instrumen Operasi Moneter dan Rata-rata Sisa Jangka Waktu	117	Grafik 7.11	Perkembangan Fungsi Intermediasi Perbankan	122
Grafik 7.5	Perkembangan Komposisi Instrumen Operasi Moneter	118	Grafik 7.12	Rasio Ekses Likuiditas Perbankan	125
Grafik 7.6	Profil Lelang SBI Tahun 2010-2011	118	Grafik 7.13	Penggunaan Berbagai Instrumen Moneter	125
Grafik 7.7	Portofolio Aliran Modal	119	Grafik 7.14	Komposisi Instrumen Moneter Berdasarkan Maturitas	126



Grafik 7.15	Suku Bunga PUAB ON dan Instrumen Moneter	126	Grafik 7.22	Kontribusi Pertumbuhan M1	128
Grafik 7.16	Selisih Suku Bunga PUAB ON Tertinggi Terendah	127	Grafik 7.23	Kontribusi Pertumbuhan M2 atas dasar Faktor-faktor yang Memengaruhi	128
Grafik 7.17	Struktur Suku Bunga PUAB O/N	127	Grafik 7.24	Angka Pengganda Uang M1 dan M2	129
Grafik 7.18	Volume PUAB	127	Grafik 7.25	Velositas M1 dan M2	129
Grafik 7.19	Suku Bunga Perbankan	127	Gambar 1.	Protokol Manajemen Krisis	131
Grafik 7.20	Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit per Jenis	128			
Grafik 7.21	Perkembangan Suku Bunga DPK, Kredit dan BI Rate	128			

Grafik 8.1	Pertumbuhan DPK	141	Grafik 8.11	Kapitalisasi Sektor <i>Tradable</i> dan <i>Nontradable</i>	154
Grafik 8.2	Komposisi Aset	141	Grafik 8.12	IHSG dan Beli/Jual Neto Asing	155
Grafik 8.3	Pertumbuhan Kredit	142	Grafik 8.13	Imbal hasil SUN dan BI Rate	155
Grafik 8.4	Perkembangan Rasio NPL (<i>Gross</i>)	142	Grafik 8.14	Struktur Termin SBN 2010-2011	155
Grafik 8.5	ROA dan NIM	143	Grafik 8.15	Beli-Jual Neto Asing SBN 2008	157
Grafik 8.6	IHSG dan BI Rate	152	Grafik 8.16	Beli-Jual Neto Asing SBN 2011	157
Grafik 8.7	IHSG dan Indeks Negara-negara Kawasan 2007-2008	152	Grafik 8.17	Struktur Termin Obligasi Korporasi	158
Grafik 8.8	IHSG dan Indeks Negara Kawasan 2010-2011	152	Grafik 8.18	Peringkat Surat Utang Pemerintah	158
Grafik 8.9	Perkembangan Sektoral Bursa 2007-2008	153	Diagram 1.	Model Kerjasama Apex BPR	160
Grafik 8.10	Perkembangan Sektoral Bursa 2010-2011	153	Diagram 2.	Model Bisnis BPR Ideal	160
			Diagram 3.	Struktur Organisasi Ideal BPR	161

DAFTAR GRAFIK & DIAGRAM

BAB IX

Kebijakan dan Kinerja Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang

Grafik 9.1	Perkembangan Transaksi BI-RTGS	168	Grafik 9.10	Perkembangan UYD	174
Grafik 9.2	Pangsa Nilai Transaksi BI-RTGS	168	Grafik 9.11	Pangsa UYD di Perbankan	174
Grafik 9.3	Pangsa Volume Transaksi BI-RTGS	169	Grafik 9.12	Pecahan UYD Berdasarkan Nominal	175
Grafik 9.4	Perkembangan Transaksi BI-SSSS	169	Grafik 9.13	Pecahan UYD Berdasarkan Lembar/Keping	175
Grafik 9.5	Perkembangan Transaksi SKNBI	170	Grafik 9.14	Perkembangan <i>Outflow</i>	175
Grafik 9.6	Perkembangan Transaksi APMK	171	Grafik 9.15	Perkembangan <i>Inflow</i>	175
Grafik 9.7	Perkembangan Transaksi <i>E-Money</i>	171	Grafik 9.16	Aliran Keluar Uang Kartal dan UYD	176
Grafik 9.8	Perkembangan UYD, PDB dan Inflasi	173	Grafik 9.17	<i>Net Outflow</i>	176
Grafik 9.9	Pertumbuhan UYD, Konsumsi RT, Rasio UYD terhadap Konsumsi RT	174	Grafik 9.18	Perkembangan <i>Net Outflow</i> KP dan KBI	176



Grafik 10.1	Operasi Keuangan Pemerintah	182	Grafik 10.10	Perkembangan Pembiayaan Anggaran	188
Grafik 10.2	Komposisi Pendapatan Negara tahun 2011	182	Grafik 10.11	Perkembangan Imbal Hasil SUN	189
Grafik 10.3	Perkembangan Pendapatan Negara	184	Grafik 10.12	Perkembangan Utang Pemerintah	189
Grafik 10.4	Perkembangan Belanja Negara	185	Grafik 10.13	Perkembangan Konsumsi Pemerintah	190
Grafik 10.5	Pengesahan APBD Provinsi	186	Grafik 10.14	Perkembangan Investasi Pemerintah	190
Grafik 10.6	Rasio Belanja Pemda terhadap Dana Perimbangan	186	Grafik 10.15	Perkembangan Transfer ke Sektor Rill	190
Grafik 10.7	Komposisi Belanja Negara tahun 2011	186	Grafik 10.16	Perkembangan Simpanan Pemerintah Pusat di BI	190
Grafik 10.8	Porsi Belanja Pegawai dan Modal	187	Grafik 10.17	Dampak Rupiah Operasi Keuangan Pemerintah	191
Grafik 10.9	Perkembangan Subsidi	187			

Grafik 11.1	Proyeksi Pertumbuhan Negara Mitra Dagang	204	Grafik 11.5	Kelas Menengah	211
Grafik 11.2	Respons Penyesuaian Upah/Gaji	207	Grafik 11.6	Rasio Konsumsi dan Investasi	211
Grafik 11.3	Pertumbuhan Tabungan, PDB, dan Konsumsi	210	Grafik 11.7	Rencana Nilai Proyek Infrastruktur dalam MP3EI	211
Grafik 11.4	Struktur Demografi Indonesia	211			

DEWAN GUBERNUR



DARMIN NASUTION
Gubernur



HARTADI A. SARWONO
Deputi Gubernur



MULIAMAN D. HADAD
Deputi Gubernur



BUDI MULYA
Deputi Gubernur





ARDHAYADI MITROATMODJO
Deputi Gubernur



HALIM ALAMSYAH
Deputi Gubernur



(ALM) S. BUDI ROCHADI
Deputi Gubernur
(wafat tanggal 7 Juli 2011)



RONALD WAAS
Deputi Gubernur
(Sejak Desember 2011)

KATA PENGANTAR

Tahun 2011 adalah tahun yang penuh dinamika dan tantangan sekaligus menguji kembali ketahanan perekonomian dan sektor keuangan nasional. Optimisme atas pemulihan ekonomi global yang mulai merebak pada awal tahun 2011 kembali memudar pada pertengahan tahun. Bahkan, sejak awal September 2011 pasar keuangan global mengalami gejolak karena memburuknya krisis utang Eropa. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian dan sektor keuangan yang terbuka tidak terkecuali menerima dampak dari gejolak global tersebut.

Di tengah persistensi gejolak global, selama tahun 2011 kestabilan makro dan sektor keuangan ternyata dapat tetap dipertahankan, sehingga mendukung pencapaian keseimbangan internal dan eksternal perekonomian nasional. Pencapaian keseimbangan perekonomian tersebut juga didukung oleh masih besarnya ruang fleksibilitas bagi kebijakan moneter dan fiskal dalam merespons beragam kejutan (*shock*) eksternal.

DARMIN NASUTION
Gubernur

Keseimbangan internal perekonomian bahkan semakin membaik sebagaimana tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai dengan menurunnya tingkat inflasi. Pada tahun 2011 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 6,5%, meningkat dari 6,1% tahun sebelumnya, bahkan merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Sedangkan, tingkat inflasi mencapai 3,79%, atau jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya (6,96%). Inflasi yang rendah tersebut diharapkan membantu mempercepat proses disinflasi menuju sasaran jangka panjang yang lebih rendah, yang setara dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang. Pencapaian angka inflasi IHK tersebut juga merupakan yang terendah kedua kali dalam sepuluh tahun terakhir.

Selain tumbuh lebih tinggi, pola pertumbuhan ekonomi juga lebih berimbang, ditandai dengan meningkatnya investasi dan ekspor. Peningkatan investasi tercermin dari tingginya impor barang modal, penyaluran kredit investasi, serta aliran masuk modal langsung asing (FDI). Kecenderungan peningkatan investasi mencerminkan proses akumulasi kapital, yang dapat mendorong efektivitas ekspansi kapasitas produktif perekonomian sekaligus menurunkan rigiditas (kekakuan) sisi penawaran perekonomian.

Sementara itu, terjaganya keseimbangan eksternal perekonomian tercermin dari kinerja neraca pembayaran (NPI) yang masih mencatat surplus meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan surplus pada neraca pembayaran, cadangan devisa meningkat dari 96,2 miliar dolar AS pada akhir 2010 menjadi 110,1 miliar dolar AS pada akhir 2011. Jumlah tersebut mampu untuk menutup 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek pemerintah.

Di sektor keuangan, selama tahun 2011 stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga cukup baik sejalan dengan meningkatnya kemampuan perbankan dalam menyerap risiko instabilitas, dengan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya. Perbaikan kondisi permodalan dan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian bank tampaknya cukup efektif dalam menahan terjadinya pemburukan kondisi industri secara drastis.

Membaiknya kinerja ekonomi dan sektor keuangan sebagaimana dikemukakan di atas tentu cukup membesarkan hati mengingat lingkungan global selama tahun 2011 yang sarat dengan gejolak. Sejak awal September 2011 skala tekanan krisis Eropa bahkan semakin meluas ke negara besar seperti Italia dan Spanyol, memicu investor menilai ulang (*repricing*) risiko berinvestasi dan mereposisi portofolio pada aset negara-negara *emerging markets*, termasuk di Indonesia. Dalam dan luasnya skala krisis utang Eropa juga menyebabkan merosotnya optimisme atas pemulihan ekonomi global.

Sebagai respon atas besarnya potensi risiko (*downside risk*) perlambatan ekonomi global dan instabilitas yang meningkat telah mendorong Bank Indonesia melakukan reorientasi dan recalibrasi bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan makroprudensial. Apabila selama tahun 2010 sampai awal 2011 bauran kebijakan cenderung diarahkan untuk merespon tekanan inflasi dan derasnya arus modal masuk, maka sejak triwulan III 2011 lebih diarahkan untuk membendung risiko pelemahan ekonomi global (*countercyclical*) serta stabilisasi pasar keuangan.

Sebagai antisipasi atas risiko pemburukan ekonomi global maka sumber-sumber pertumbuhan berbasis domestik perlu diperkuat. Disertai keyakinan semakin terkendalinya inflasi, oleh karenanya sejak September 2011 respons kebijakan moneter mulai memasuki fase longgar. Perubahan *stance* tersebut diawali dengan diturunkannya batas bawah koridor suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) dan diikuti oleh penurunan BI Rate pada Oktober dan November 2011 sehingga BI Rate menjadi 6,0% pada akhir 2011.

Dalam rangka menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan, Bank Indonesia menempuh beberapa langkah kebijakan termasuk melakukan stabilisasi nilai tukar dan pasar SBN secara simultan. Langkah kebijakan ini juga memperkaya dan meningkatkan efisiensi operasi moneter karena bertambahnya akumulasi SBN di Bank Indonesia yang dapat digunakan dalam rangka operasi moneter. Ke depan, stabilitas nilai tukar juga akan didukung oleh implementasi peraturan yang mewajibkan penerimaan devisa hasil

ekspor (DHE) dan devisa utang luar negeri (DULN) diterima melalui bank devisa di dalam negeri.

Bank Indonesia juga terus menempuh beberapa langkah kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan meningkatkan efisiensi perbankan agar sektor perbankan dapat berkontribusi lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sementara itu, penajaman kebijakan di bidang sistem pembayaran terus ditempuh untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran serta untuk mendukung penguatan kebijakan moneter dan perbankan.

Memasuki tahun 2012, kondisi ekonomi global diperkirakan tidak akan lebih baik dari tahun 2011. Sampai di penghujung tahun 2011 belum diperoleh gambaran pasti sampai seberapa dalam dan lama krisis utang Eropa akan berlangsung karena dimensi permasalahannya yang sangat luas. Beberapa negara Eropa masih terjebak dalam suatu lingkaran buruk yang secara negatif saling mempengaruhi (*adverse feedback loop*) yaitu antara krisis utang pemerintah, kondisi perbankan yang merapuh, dan aktivitas ekonomi yang melambat. Dalam dan luasnya krisis utang Eropa menimbulkan potensi risiko sangat besar yang dapat mengkoreksi ke bawah (*downside risk*) prospek ekonomi global pada 2012.

Namun, prospek perekonomian global yang kurang menggembirakan pada 2012 tidak berarti bahwa perekonomian nasional tanpa peluang untuk tetap tumbuh tinggi apabila basis-basis pertumbuhan

domestik semakin dapat dimantapkan. Dengan mempertimbangkan seluruh peluang dan tantangan yang dihadapi, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian nasional di tahun 2012 akan tumbuh 6,3% - 6,7%.

Menurunnya BI Rate sejak Oktober 2011 diperkirakan akan mampu menghidupkan sumber-sumber pembiayaan domestik, terutama yang berasal dari sektor perbankan. Laju pertumbuhan investasi diperkirakan masih akan meningkat yang pada gilirannya akan mampu menjaga kekuatan daya beli masyarakat. Peluang untuk meningkatkan investasi akan semakin besar setelah seluruh lembaga pemerangkat menempatkan kembali Indonesia ke dalam peringkat layak investasi (*investment grade*). Di pihak lain, dalam kondisi ekonomi global yang melambat dan kapasitas produksi di domestik yang memadai, Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada 2012 akan stabil di tingkat 4,5% jika tidak ada perubahan kebijakan harga BBM.

Demikianlah gambaran perekonomian Indonesia tahun 2011 dan prospeknya di tahun 2012 yang uraiannya secara lengkap terdapat pada Laporan Perekonomian Indonesia ini. Saya berharap laporan ini dapat menjadi bahan referensi yang mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Akhir kata, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, saya menyampaikan penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Perekonomian Indonesia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridhanya dan melindungi setiap langkah kita dalam berkarya.

Jakarta, Maret 2012
Gubernur Bank Indonesia



Darmin Nasution



RINGKASAN EKSEKUTIF

KETAHANAN PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. Peningkatan kinerja tersebut disertai dengan perbaikan kualitas pertumbuhan yang tercermin dari tingginya peran investasi dan ekspor sebagai sumber pertumbuhan, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang semakin membaik. Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus yang relatif besar dengan cadangan devisa yang meningkat dan nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi. Di sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski sempat terjadi tekanan di pasar keuangan pada semester II tahun 2011 sebagai dampak memburuknya krisis yang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat (AS). Dengan ketahanan ekonomi yang kuat dan risiko utang luar negeri yang rendah, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang tetap pruden dan berbagai langkah kebijakan struktural yang terus ditempuh selama ini, Indonesia kembali memperoleh peningkatan peringkat menjadi Investment Grade.

Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat mampu meminimalkan dampak dari gejolak ekonomi global. Ketidakpastian yang muncul akibat krisis utang Eropa dan kekhawatiran terhadap prospek pemulihan perekonomian AS telah memicu gejolak di pasar keuangan dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global tahun 2011. Dampak dari gejolak global tersebut ke Indonesia lebih banyak dirasakan di pasar keuangan terutama pasar saham dan obligasi, sementara dampak pada sektor riil relatif minimal. Di sektor keuangan, penarikan modal luar



negeri oleh sebagian investor pada semester II tahun 2011 memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi Pemerintah, dan harga saham. Namun, dengan langkah-langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, didukung oleh kuatnya fundamental sektor keuangan dan terjaganya stabilitas makroekonomi, gejolak pasar keuangan dapat dihindari. Di sektor riil, daya tahan perekonomian Indonesia dari sisi eksternal didukung oleh diversifikasi pasar ekspor dengan semakin besarnya perdagangan intra-regional di kawasan Asia dan semakin meningkatnya peran foreign direct investment (FDI). Dari sisi domestik, daya tahan ekonomi juga didukung oleh kuatnya daya beli terkait dengan meningkatnya pendapatan dan struktur demografi yang sebagian besar berada dalam usia produktif.

Di samping fundamental ekonomi yang kuat, respons kebijakan yang tepat mampu menopang ketahanan perekonomian nasional. Bank Indonesia dan Pemerintah melakukan koordinasi kebijakan dalam memperkuat fundamental ekonomi sekaligus memitigasi dampak gejolak eksternal. Dari sisi Bank Indonesia, penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial secara terukur dan pada waktu yang tepat telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut diterapkan melalui respons kebijakan suku bunga dan nilai tukar, serta kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas perbankan. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut juga didukung oleh strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mengurangi ketidakpastian pelaku pasar. Dalam bidang perbankan, Bank Indonesia terus memperkuat ketahanan perbankan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan mendorong intermediasi yang diarahkan pada sektor-sektor produktif. Dari sisi Pemerintah, kebijakan fiskal diarahkan kepada peningkatan stimulus dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Secara sektoral, Pemerintah terus berupaya mendorong dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing industri dan produk ekspor, serta peningkatan ketahanan pangan nasional termasuk dalam rangka stabilisasi harga. Koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan stabilitas makro juga diperkuat melalui implementasi Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan pengendalian inflasi di pusat dan daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Prospek ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan masih tetap kuat, meskipun risiko yang berasal dari pelemahan ekonomi global masih tinggi. Perekonomian nasional pada tahun 2012 diperkirakan tumbuh 6,3% - 6,7% dan inflasi diperkirakan dapat berada di kisaran sasaran 4,5% ± 1%. Pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari perekonomian domestik dengan peran investasi yang semakin meningkat. Pasar domestik yang besar, terjaganya stabilitas makroekonomi, suku bunga yang rendah, perbaikan iklim investasi, dan status investment grade merupakan faktor pendorong tingginya pertumbuhan investasi ke depan. Sejalan dengan itu, arus modal masuk FDI diperkirakan akan meningkat lebih tinggi sehingga surplus NPI akan tetap besar. Kondisi ini mendukung tercapainya stabilitas nilai tukar rupiah dalam menghadapi risiko tingginya gejolak arus modal. Meskipun demikian, risiko pelemahan ekonomi global dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung ke batas bawah kisaran prakiraan apabila tidak ditempuh langkah-langkah stimulus baik dari sisi moneter maupun fiskal. Sementara itu, rencana kebijakan Pemerintah terkait dengan BBM bersubsidi dan komoditas strategis lainnya dapat memberikan tekanan ke atas terhadap perkembangan inflasi ke depan.

Dalam tahun 2012, Bank Indonesia akan mengoptimalkan peran bauran kebijakan moneter untuk menjaga inflasi tetap berada di dalam kisaran sasarannya serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memitigasi risiko perlambatan ekonomi global. Sementara di bidang perbankan, Bank Indonesia akan meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan. Di samping itu, Bank Indonesia terus berupaya memperluas akses perbankan pada masyarakat (financial inclusion). Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan serta penerapan aspek perlindungan konsumen, baik dalam sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri. Dengan langkah-langkah ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diyakini dapat kembali berada di tengah kisaran prakiraan. Dalam jangka menengah, dengan perekonomian dunia yang diperkirakan akan membaik dan kebijakan struktural yang terus dilakukan khususnya di bidang investasi dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai prospek untuk tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Perekonomian nasional diperkirakan akan tumbuh mencapai 6,6%-7,4% dan inflasi yang semakin menurun dan menuju 4,0% ± 1% pada tahun 2016.

PEREKONOMIAN GLOBAL

Perkembangan ekonomi global pada tahun 2011 diwarnai oleh peningkatan ketidakpastian yang muncul akibat berlarutnya penyelesaian krisis utang dan kekhawatiran terhadap prospek pemulihan ekonomi di negara maju. Di AS, sejumlah indikator menunjukkan proses pemulihan ekonomi tidak sekuat yang diperkirakan. Sementara itu di Eropa, berlarut-larutnya penanganan krisis utang semakin memperburuk kondisi sektor keuangan dan pemulihan ekonomi di kawasan itu. Meningkatnya ketidakpastian di dua kawasan negara maju tersebut telah memicu gejolak di pasar keuangan global dan ditambah dengan terjadinya bencana alam di Jepang dan krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah, memperlemah proses pemulihan ekonomi global tahun 2011.

Pada awal tahun, optimisme mengenai semakin baiknya proses pemulihan ekonomi global sangatlah tinggi. Pada Januari 2011, IMF merevisi ke atas angka perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2011 menjadi 4,4%, setelah pada Oktober 2010 diperkirakan mencapai 4,2%. Perkiraan pertumbuhan yang berada di atas rata-rata historisnya tersebut menunjukkan adanya harapan mengenai percepatan proses pemulihan ekonomi global pada waktu itu¹. Namun, memasuki semester II tahun 2011, pesimisme pemulihan global mulai muncul seiring dengan meningkatnya ketidakpastian akibat penanganan krisis utang di Eropa yang berlarut-larut dan terhambatnya pemulihan ekonomi AS. Pada Oktober 2011 IMF merevisi ke bawah angka perkiraan pertumbuhan global tahun 2011 menjadi hanya 4%, kembali tumbuh di bawah level normalnya.

Melemahnya optimisme pemulihan ekonomi global tidak terlepas dari dinamika perkembangan berbagai indikator ekonomi dan respons kebijakan yang ditempuh di berbagai negara. Pada awal tahun 2011, setelah menjalani proses pemulihan yang tidak berimbang pada tahun 2010 (*multi speed recovery*), pemulihan ekonomi global diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2011 dengan perimbangan pertumbuhan yang semakin tinggi di negara-negara maju. Berbagai perkembangan positif di negara maju mendukung optimisme pemulihan akan berjalan dengan cepat pada waktu itu. Konsumsi di AS dan Jepang menunjukkan

perbaikan, sementara di kawasan Eropa diwarnai oleh membaiknya neraca perdagangan Jerman dan Perancis. Di negara-negara emerging markets, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan bahkan di beberapa negara, seperti China dan India, ditengarai mulai terjadi gejala pemanasan ekonomi.

Namun, momentum pemulihan ekonomi tersebut mulai terganggu dengan terjadinya bencana alam di Jepang pada 11 Maret 2011. Terhentinya aktivitas produksi mengakibatkan ekonomi Jepang berkontraksi dan pasokan produk Jepang ke pasar global (*global supply chain*) terganggu. Di samping itu, pecahnya krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak pada melambungnya harga minyak dan harga komoditas lainnya yang pada gilirannya meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara. Sementara di negara maju tetap melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif, di negara-negara *emerging markets* menempuh respons kebijakan moneter yang cenderung ketat. Perbedaan respons kebijakan moneter ini, di tengah berlanjutnya ketidakseimbangan pemulihan ekonomi dan besarnya ekspos likuiditas global, mendorong semakin derasnya arus modal asing ke negara-negara *emerging markets*.

Pada triwulan II 2011, momentum pemulihan ekonomi dunia mulai memudar dengan semakin memburuknya krisis utang pemerintah di kawasan Eropa. Kondisi utang Portugal dan Yunani yang semakin memburuk mengakibatkan peringkat utang kedua negara tersebut kembali diturunkan. Hal ini memicu munculnya sentimen negatif di pasar keuangan yang menimbulkan terjadinya tekanan harga aset keuangan akibat upaya pengalihan investasi dari aset yang berisiko ke aset yang dianggap lebih aman (*flight to quality*) yang dilakukan investor global. Di negara-negara *emerging markets*, selain harga aset keuangan, aliran modal asing dan nilai tukar juga menjadi lebih fluktuatif.

Pada triwulan III hingga akhir tahun 2011, kondisi perekonomian global semakin memburuk sejalan dengan semakin dalam dan luasnya krisis utang pemerintah negara maju. Krisis yang dimulai di negara periferal kawasan Eropa mulai merambah negara-negara inti Eropa terkait dengan tingginya hubungan yang kuat antarperekonomian dan sektor perbankan di kawasan Eropa. Pada saat yang sama, upaya pemulihan ekonomi AS melalui stimulus fiskal dan kebijakan moneter ekstra akomodatif belum berhasil mendorong aktivitas ekonomi. Paket stimulus

1 Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sejak tahun 2000 s/d 2010 adalah 4,2%. Tingginya pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2010 (5,1%) lebih disebabkan oleh rendahnya level *output* dunia pada tahun 2009 akibat krisis.

tersebut belum berhasil mengembalikan keyakinan konsumen, menurunkan angka pengangguran dan memulihkan sektor properti, sehingga belum dapat mendorong peningkatan konsumsi secara permanen. Lebih buruk lagi, tingginya beban utang pemerintah AS dan ketidakpastian respons kebijakan yang akan ditempuh untuk mengatasinya menyebabkan peringkat utang pemerintah AS diturunkan dari AAA menjadi AA+. Kondisi tersebut memicu gejolak di pasar keuangan global dengan intensitas yang lebih tinggi. Di negara-negara emerging markets, terjadi pembalikan aliran modal asing dalam jumlah besar yang menyebabkan pelemahan nilai tukar dan koreksi harga aset finansial yang tajam.

Krisis di AS dan Eropa telah menimbulkan dampak rambatan (*spillover effects*) ke negara emerging markets. Melalui jalur perdagangan (*trade channel*), melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju berdampak pada melemahnya permintaan impor sehingga volume perdagangan dunia tumbuh melambat. Akibatnya, pertumbuhan ekspor negara emerging markets mengalami perlambatan dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Intensitas dampaknya akan tergantung pada struktur ekspor dan kapasitas permintaan domestik masing-masing negara. Secara umum, perlambatan pertumbuhan akan cenderung lebih kecil di negara emerging markets yang basis ekspornya komoditas sumber daya alam dan kapasitas permintaan domestik lebih besar. Selain itu, dampaknya juga akan dipengaruhi oleh respons kebijakan yang ditempuh untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi global tersebut, baik melalui kebijakan moneter yang akomodatif maupun stimulus fiskal. Pertimbangan ini, dan dengan terkendalinya tekanan inflasi seiring dengan menurunnya harga komoditas global di penghujung tahun 2011, yang mendorong sejumlah bank sentral, termasuk Bank Indonesia, menurunkan suku bunga kebijakan moneternya. Secara keseluruhan, negara-negara emerging markets masih mampu tumbuh tinggi dan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi global.

Melalui jalur pasar keuangan (*financial market channel*), krisis utang Eropa dan AS menimbulkan gejolak di pasar keuangan global. Maraknya berita negatif seputar eskalasi krisis utang pemerintah terutama di dua negara maju tersebut menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan yang mengakibatkan meningkatnya perilaku menghindari risiko (*risk aversion*) dan flight to quality.

Di negara-negara emerging markets, terjadi pembalikan arus modal asing yang sangat besar pada triwulan III 2011 dan menimbulkan tekanan pelemahan nilai tukar yang tajam dan jatuhnya harga saham dan obligasi. Menghadapi tekanan gejolak pasar keuangan global seperti ini, meskipun ruang fleksibilitas nilai tukar tetap diberikan, negara-negara emerging markets melakukan langkah-langkah stabilisasi pasar keuangan khususnya melalui intervensi di pasar valuta asing. Kebijakan ini dimungkinkan dengan kecukupan cadangan devisa yang dimiliki. Di sejumlah bank sentral, termasuk Bank Indonesia, langkah stabilisasi juga dilakukan melalui pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder. Secara keseluruhan, stabilitas pasar keuangan di negara emerging markets tetap terjaga dan kembali normal di penghujung tahun 2011.

KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, perkembangan makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia selama tahun 2011 menunjukkan ketahanan yang kuat. Dampak rambatan krisis global terhadap ekonomi Indonesia melalui jalur perdagangan relatif terbatas. Kinerja ekspor Indonesia masih tetap tinggi yang terutama didorong oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam dan adanya diversifikasi pasar dengan perdagangan intra-regional di kawasan Asia yang semakin meningkat. Sementara melalui jalur pasar keuangan, walaupun sempat mengalami tekanan pada semester II 2011, ketahanan sistem keuangan masih dapat terjaga berkat kuatnya fundamental sektor keuangan dalam menyerap risiko dan terjaganya stabilitas makroekonomi, didukung oleh langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Dari sisi domestik, daya tahan ekonomi juga didukung oleh kuatnya daya beli terkait dengan meningkatnya pendapatan dan struktur demografi yang sebagian besar berada dalam usia produktif.

Dengan adanya ketahanan tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2011 relatif tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global dan dapat berkinerja dengan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi meningkat cukup tinggi disertai dengan perbaikan kualitas pertumbuhan yang tercermin dari meningkatnya peran investasi dan tingginya ekspor sebagai sumber pertumbuhan, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang semakin membaik. Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus baik pada

neraca transaksi berjalan maupun transaksi modal, cadangan devisa meningkat, nilai tukar rupiah menguat, dan tekanan inflasi menurun secara signifikan. Bersamaan dengan itu, kinerja perbankan dan pasar keuangan Indonesia pada tahun 2011 secara umum juga menunjukkan perbaikan. Berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian dan rendahnya risiko utang luar negeri, yang didukung oleh kebijakan makroekonomi yang tetap prudent dan berbagai langkah kebijakan struktural yang telah ditempuh, telah membuahkan hasil peningkatan peringkat Indonesia mencapai posisi layak investasi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 meningkat menjadi 6,5%, dan merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Secara umum, tingginya pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh terjaganya stabilitas makroekonomi dengan nilai tukar rupiah yang stabil dan inflasi yang rendah, peningkatan kapasitas perekonomian, serta stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Pertumbuhan yang tinggi tersebut hampir merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi di Kawasan Jawa dan terendah di Kawasan Timur Indonesia, terutama di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan wilayah Kalimantan.

Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari meningkatnya pertumbuhan konsumsi dan investasi. Di samping meningkatnya pengeluaran pemerintah, kuatnya pertumbuhan konsumsi juga didukung oleh peningkatan pendapatan dan tingginya keyakinan konsumen. Investasi tumbuh sangat tinggi, khususnya investasi non-bangunan, yang mencerminkan respons dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan kuatnya permintaan dan kondusifnya iklim usaha di dalam negeri. Sementara itu, ekspor masih tumbuh tinggi walaupun mulai mengalami perlambatan di penghujung tahun 2011 seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Perkembangan ini direspons oleh perlambatan impor yang terutama terkait dengan penurunan permintaan bahan baku untuk kegiatan ekspor.

Di sisi sektoral, perkembangan sektor *tradables* memperlihatkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini terutama ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan sektor industri yang mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Namun, sektor pertanian tumbuh terbatas terkait dengan terbatasnya penambahan lahan tanaman bahan makanan, dan sektor pertambangan tumbuh melambat akibat rendahnya produksi migas.

Sementara itu, perkembangan sektor *nontradables* tetap menunjukkan peningkatan seiring dengan kuatnya aktivitas domestik. Peningkatan kinerja sektor *nontradables* terutama berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan; dan sektor jasa-jasa. Sektor lainnya, seperti sektor bangunan serta sektor transportasi dan komunikasi, juga masih tumbuh relatif tinggi.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berkinerja lebih baik dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Di tengah penurunan pertumbuhan negara-negara *emerging markets* secara keseluruhan termasuk negara-negara ASEAN, perekonomian Indonesia justru tumbuh meningkat. Penurunan pertumbuhan perekonomian negara-negara sekawasan tersebut berasal dari penurunan kinerja ekspor, sementara kinerja ekspor Indonesia relatif terjaga baik. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bersumber dari tetap kuatnya daya dukung permintaan domestik.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga telah membuka lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,6% pada tahun 2011 dari 7,1% pada tahun 2010. Selain itu, kualitas ketenagakerjaan juga mengalami perbaikan dengan meningkatnya tenaga kerja di sektor formal dan membaiknya latar belakang pendidikan tenaga kerja. Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin turun dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 12,36% pada tahun 2011. Penurunan itu didukung oleh tingkat inflasi yang menurun, upah minimum yang naik, dan nilai tukar petani yang membaik.

Kinerja eksternal ekonomi Indonesia tahun 2011 juga tetap solid dalam menghadapi gejolak perekonomian global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2011 mencatat surplus yang relatif besar, yaitu sebesar 11,9 miliar dolar AS. Secara fundamental, kinerja NPI tersebut menunjukkan ketahanan perekonomian sebagaimana tercermin dari surplus neraca perdagangan dan derasnya transaksi investasi langsung asing di Indonesia (FDI). Di tengah melambatnya volume perdagangan dan menurunnya harga komoditas global, kinerja ekspor Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang tinggi sehingga mendukung peningkatan surplus neraca perdagangan khususnya komoditas non-migas. Transaksi FDI terus menunjukkan peningkatan didukung oleh semakin kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas perekonomian di dalam negeri. Transaksi portofolio investasi untuk keseluruhan tahun juga mencatat surplus, meskipun

pada semester II mengalami pembalikan aliran modal (*net outflow*) sebagai dampak gejala di pasar keuangan global. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mencatat peningkatan sehingga pada akhir 2011 mencapai 110,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Kecukupan cadangan devisa ini juga mampu menjadi penyangga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan dalam meredam gejala eksternal, termasuk dari risiko pembalikan modal asing.

Surplus NPI tersebut berpengaruh pada penguatan nilai tukar rupiah pada tahun 2011. Nilai tukar rupiah secara rata-rata menguat sebesar 3,56% dari Rp9.080 per dolar AS pada tahun 2010 menjadi Rp8.786 per dolar AS. Penguatan terutama terjadi pada paruh pertama tahun 2011 seiring dengan masih kondusifnya perkembangan ekonomi dan keuangan global. Di sisi domestik, penguatan rupiah terutama didukung oleh kuatnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, indikator risiko yang relatif stabil, serta imbal hasil aset rupiah yang tinggi sehingga mendorong minat investor asing untuk melakukan investasi di pasar keuangan domestik. Penguatan nilai tukar rupiah tersebut sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara regional sehingga daya saing Indonesia masih cukup kompetitif.

Meskipun menguat secara keseluruhan tahun, perkembangan nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi di akhir tahun terkait tingginya faktor ketidakpastian yang muncul akibat krisis utang di Eropa dan permasalahan ekonomi AS. Nilai tukar rupiah mulai melemah pada triwulan III diiringi dengan volatilitas yang meningkat. Di akhir tahun nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 9.068 per dolar AS, melemah 0,6% secara point to point dibandingkan dengan Rp 9.010 per dolar AS pada akhir tahun 2010.

Dari sisi perkembangan harga, ketahanan makroekonomi Indonesia semakin diperkuat dengan terkendalinya inflasi di level yang rendah, di tengah relatif tingginya pertumbuhan ekonomi. Perkembangan IHK tahun 2011 mencatat inflasi sebesar 3,79%, jauh menurun dari tahun sebelumnya 6,96% dan berada di bawah sasaran inflasi tahun 2011 yang ditetapkan sebesar 5%±1%. Pencapaian angka inflasi IHK tersebut juga merupakan yang terendah kedua kali dalam sepuluh tahun terakhir setelah pertama kali tercatat pada tahun 2009 (2,78%), setahun selepas krisis keuangan global tahun 2008. Penurunan inflasi terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan inflasi terendah di Kawasan Jawa dan tertinggi di Kawasan Timur Indonesia. Inflasi yang rendah tersebut diharapkan

membantu mempercepat proses disinflasi menuju level yang setara dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang.

Penurunan inflasi IHK didukung oleh terjaganya inflasi inti pada level yang rendah, inflasi bahan pangan yang menurun tajam, dan inflasi *administered prices* yang terjaga pada level yang minimal. Inflasi inti cukup stabil pada tingkat yang relatif rendah yaitu 4,3%, ditopang oleh kapasitas perekonomian yang memadai dan apresiasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, laju inflasi bahan pangan hanya tercatat sebesar 3,37% terkait dengan terjaganya pasokan dan koreksi harga ke bawah yang cukup dalam setelah mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun sebelumnya. Selain itu, rendahnya tekanan inflasi juga bersumber dari minimalnya kebijakan Pemerintah terkait harga komoditas strategis sehingga inflasi *administered prices* terjaga pada level yang rendah sebesar 2,78%.

Jika dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan, yang umumnya memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dari Indonesia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, inflasi Indonesia di tahun laporan menurun paling tajam. Bahkan pada tahun ini inflasi Indonesia berada sejajar di kisaran level inflasi negara-negara tersebut.

Pencapaian tingkat inflasi rendah tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia mampu mengendalikan tekanan inflasi melalui penetapan BI Rate yang konsisten, apresiasi nilai tukar rupiah, serta strategi komunikasi yang baik dalam penetapan kebijakan moneter. Penguatan nilai tukar yang diakomodir oleh Bank Indonesia secara langsung dapat meredam dampak kenaikan harga komoditas internasional terhadap inflasi (*imported inflation*). Secara tidak langsung, penguatan rupiah berdampak pada peningkatan impor barang modal yang cukup pesat dalam meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga kesenjangan antara permintaan dan penawaran tetap terjaga.

Di sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk mengatasi tekanan inflasi yang berasal dari keterbatasan pasokan dan hambatan distribusi, khususnya bahan pangan dan energi. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memberikan subsidi dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas energi. Dalam implementasinya, upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi kebijakan yang erat antara Bank

Indonesia dan Pemerintah baik di level pusat maupun daerah, melalui berbagai forum, khususnya Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sementara itu, kinerja sistem keuangan pada tahun 2011 juga menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak pasar keuangan global. Daya tahan tersebut antara lain ditunjukkan oleh kinerja industri perbankan yang tetap solid serta kinerja pasar keuangan yang mampu memberikan imbal hasil yang menarik dan relatif stabil. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari terjaganya stabilitas makroekonomi, fundamental emiten yang kokoh, serta langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dan otoritas terkait. Kondisi tersebut pada akhirnya semakin memupuk kepercayaan investor pada sektor keuangan di Indonesia.

Industri perbankan nasional pada tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Dalam hal ini kredit tumbuh sebesar 24,1%, sementara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) meningkat dari 75,5% pada akhir tahun 2010 menjadi 79,0% pada Desember 2011. Pertumbuhan kredit juga semakin berkualitas sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor produktif, seperti tercermin pada pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 33,2% pada tahun 2011, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit konsumsi 24,1 %.

Perbaikan kondisi permodalan dan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian bank cukup efektif dalam menjaga kesehatan kondisi industri perbankan sehingga semakin memperkuat kemampuannya dalam menyerap risiko. Kondisi tersebut tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-performing Loan - NPL*) yang secara bruto tercatat hanya 2,2%, jauh di bawah ambang batas indikatif sebesar 5%, sementara rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) cukup tinggi mencapai 16,1%. Selain itu, ketersediaan likuiditas perbankan juga cukup memadai. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 tumbuh 19,0%, sedangkan rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposits* tetap terjaga pada level di atas 100%, yaitu sebesar 133,4%.

Selain tangguh dalam menyerap risiko, industri perbankan nasional juga membukukan peningkatan keuntungan yang cukup besar. Rasio keuntungan perbankan Indonesia paling besar dibandingkan dengan

negara-negara ASEAN. Pada tahun 2011, tingkat *Return on Asset* (ROA) industri perbankan mencapai 3,0%, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang rata-rata hanya mencapai 1,14%.

Sejalan dengan industri perbankan, kinerja pasar keuangan Indonesia secara umum juga menunjukkan kinerja yang membaik. Di tengah memburuknya kinerja pasar saham dunia, kinerja pasar saham Indonesia mengalami perbaikan dengan IHSG yang menguat 3,2% dengan volatilitas yang rendah. Dampak memburuknya krisis Eropa cukup berpengaruh di pasar saham Indonesia yang tercermin pada penurunan IHSG di bulan September 2011 menjadi 3.549, setelah sempat mencapai level tertinggi sepanjang sejarah bursa, yaitu sebesar 4.193 pada Agustus 2011. Namun, daya tahan bursa saham Indonesia cukup kokoh dengan pemulihan indeks yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan negara kawasan. Struktur sektoral penyumbang pertumbuhan bursa saham yang makin berimbang dan berkualitas turut menopang penguatan daya tahan pasar saham domestik. Dalam hal ini kontribusi sektor aneka industri cenderung lebih menonjol. Pencapaian tersebut menempatkan pasar saham Indonesia sebagai bursa dengan kinerja terbaik di negara kawasan.

Di pasar obligasi, kinerja pasar SBN dan obligasi korporasi juga menunjukkan daya tahan dan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2011, pergerakan imbal hasil SBN dan obligasi korporasi masing-masing turun sebesar 87bps dan 15bps. Pasar SBN juga lebih tahan dalam mengalami gejolak yang dipicu oleh beberapa sentimen pasar, antara lain sentimen atas kebijakan yang terlambat (*behind the curve*) di awal tahun 2011 dan meningkatnya risiko krisis utang Eropa dan permasalahan fiskal AS. Hal ini ditunjukkan tidak saja oleh kenaikan imbal hasil yang lebih rendah di bulan September 2011 dibandingkan dengan kenaikannya di awal tahun, tetapi juga pasar SBN memiliki masa pemulihan yang cepat pasca-memburuknya krisis AS dan Eropa tersebut. Di samping karena langkah otoritas fiskal dalam menjaga stabilitas pasar SBN melalui program *buyback* selama tahun 2011, relatif stabilnya harga SBN tersebut tidak terlepas dari langkah Bank Indonesia membeli SBN dari pasar sekunder dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sistem pembayaran nasional dalam tahun laporan menunjukkan kinerja yang baik. Perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan ditunjukkan oleh tingginya peningkatan nilai transaksi dan tidak terjadinya kegagalan penyelesaian transaksi nontunai.

Selama tahun 2011, total nilai transaksi pembayaran melalui sistem pembayaran di Indonesia mencapai 10,4 kali dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 9,0 kali dari nilai PDB. Hal tersebut menunjukkan sistem pembayaran memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini akan terus mendorong penggunaan sistem pembayaran nontunai sebagai alat transaksi yang lebih efisien.

Namun, di sisi pembayaran tunai, preferensi masyarakat dalam penggunaan uang kartal sebagai instrumen pembayaran masih tetap tinggi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (UYD) yang lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi masyarakat secara nominal serta pertumbuhan rata-rata UYD yang tinggi. Pada tahun 2011, konsumsi masyarakat tumbuh 11,3% sedangkan UYD tumbuh rata-rata sebesar 16,9%, naik dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,1%.

BAURAN KEBIJAKAN YANG DITEMPUH

Berbagai pencapaian positif pada kinerja perekonomian nasional tahun 2011 merupakan buah dari hasil kerja keras dan jalinan kerjasama di antara semua pemangku kebijakan. Dari sisi otoritas, berbagai langkah kebijakan ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menjaga stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika perekonomian nasional yang terjadi selama tahun 2011. Kerjasama tersebut juga didukung secara aktif baik oleh kalangan perbankan, para pelaku dunia usaha dan masyarakat secara luas.

Kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2011 pada dasarnya merupakan penguatan dari bauran kebijakan (*policy mix*) yang telah diimplementasikan pada tahun sebelumnya. Kebijakan suku bunga selama tahun 2011 tetap diarahkan agar konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu $5\% \pm 1\%$ pada tahun 2011 dan $4,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2012. Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga fleksibilitas perkembangan rupiah agar tetap konsisten dengan arah perkembangan makroekonomi ke depan, khususnya pencapaian sasaran inflasi, dan menjaga stabilitasnya dalam jangka pendek. Kebijakan makroprudensial pun diperkuat dengan penetapan berbagai ketentuan dalam rangka mengelola likuiditas domestik dan mengelola arus modal asing terutama yang berjangka pendek.

Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut juga didukung oleh strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mengurangi ketidakpastian pelaku pasar.

Penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut disesuaikan dengan dinamika tantangan ekonomi yang berkembang selama tahun 2011. Dalam semester I 2011, perekonomian nasional diwarnai oleh meningkatnya tekanan inflasi karena kenaikan harga komoditas internasional serta gangguan pada pasokan dan distribusi pangan khususnya di awal tahun. Dalam waktu bersamaan, derasnya arus modal asing, di samping memberikan manfaat bagi pembiayaan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan, juga menyebabkan kecenderungan peningkatan risiko pembalikan modal khususnya yang berjangka pendek dan cenderung spekulatif. Sehubungan dengan itu, pada Februari 2011 Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25bps menjadi 6,75% sebagai respons atas meningkatnya tekanan inflasi di awal tahun 2011. Di sisi nilai tukar, respons kebijakan suku bunga ini diperkuat dengan memberikan ruang bagi penguatan rupiah yang lebih besar untuk meredam tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga komoditas internasional (*imported inflation*).

Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial terkait dengan pengelolaan aliran modal asing yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya. Sasaran kebijakan tersebut yaitu untuk mendorong aliran modal asing ke arah yang lebih berjangka panjang bagi pembiayaan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan, serta memitigasi dampak yang dapat ditimbulkan dari aliran modal jangka pendek terhadap risiko pembalikan modal dan instabilitas di pasar keuangan. Berbagai kebijakan makroprudensial yang ditempuh yaitu: (i) memperpanjang masa endap minimal SBI dari 1 bulan ke 6 bulan; (ii) membatasi pinjaman luar negeri jangka pendek bank menjadi maksimal 30% modal bank; dan (iii) meningkatkan manajemen likuiditas perbankan melalui peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing untuk berjaga-jaga terhadap penarikan dana dalam valas.

Selanjutnya, memasuki pertengahan semester II 2011, memburuknya kondisi ekonomi dan keuangan global meningkatkan risiko pada kinerja perekonomian Indonesia. Di samping risiko penurunan pertumbuhan akibat melambatnya kinerja perekonomian dunia, persepsi risiko di pasar keuangan global juga meningkat yang berdampak pada pembalikan arus modal ke

luar dari *emerging markets*, termasuk Indonesia. Menghadapi perubahan drastis kondisi perekonomian global ini, Bank Indonesia mulai menempuh kebijakan moneter yang cenderung akomodatif. Sejalan dengan itu, pada Oktober dan November 2011 Bank Indonesia menurunkan BI Rate masing-masing sebesar 25 bps dan 50 bps sehingga BI Rate menjadi 6,0%. Keputusan tersebut didasari keyakinan kuat bahwa inflasi ke depan akan semakin rendah. Di sisi lain, kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat basis permintaan domestik sebagai langkah *countercyclical* dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi global. Respons kebijakan moneter yang akomodatif tersebut juga diperkuat dengan diturunkannya batas bawah koridor suku bunga operasi moneter untuk fasilitas simpanan bank di Bank Indonesia (*deposit facility*) O/N dari 100 bps menjadi 150 bps di bawah BI Rate sejak September 2011.

Untuk memitigasi tekanan di pasar keuangan, khususnya terhadap nilai tukar, yang semakin kuat akibat besarnya pembalikan modal asing, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi rupiah dengan memanfaatkan cadangan devisa yang diakumulasi sebelumnya. Kebijakan ini terutama ditempuh melalui intervensi untuk menambah pasokan di pasar valuta asing. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder baik secara bilateral maupun melalui lelang. Di samping mengatasi secara langsung sumber tekanan rupiah dari pelepasan SBN oleh investor asing, kebijakan ini juga untuk menghindari keketatan likuiditas di pasar uang rupiah akibat intervensi valas oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk secara bertahap meningkatkan SBN sebagai instrumen moneter.

Sementara itu, untuk memperkuat manajemen pencegahan dan penanganan krisis, termasuk yang dapat diakibatkan oleh meningkatnya risiko dan ketidakpastian global, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang dibangun dari prosedur baku yang telah dipraktikkan selama ini. Pada dasarnya, PMK merupakan suatu mekanisme dan kerangka kerja yang mengatur proses pencegahan dan penanganan krisis secara sistematis dan terintegrasi dalam skala nasional. Di dalamnya diatur mengenai indikator kerentanan yang dapat menimbulkan suatu krisis, penetapan kondisi tekanan, mekanisme pengambilan keputusan, dan organisasi yang terkait. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia lebih fokus pada PMK yang terkait dengan krisis nilai tukar

dan krisis perbankan. Sementara itu, Pemerintah membangun PMK yang terkait dengan krisis pasar keuangan, krisis fiskal, dan krisis lembaga keuangan bukan bank.²

Selanjutnya, dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar valas, terobosan kebijakan yang bersifat lebih struktural perlu diterapkan dengan tetap dalam koridor rezim devisa bebas (UU No. 24 tahun 1999). Kebijakan ini penting ditempuh untuk memperkuat ketersediaan pasokan valas yang lebih permanen. Oleh karena itu, pada akhir September 2011 Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) diterima melalui bank devisa di dalam negeri. Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai Januari 2012.

Di bidang perbankan, selama tahun 2011 Bank Indonesia terus memperkuat ketahanan perbankan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan mendorong intermediasi yang diarahkan pada sektor-sektor produktif. Berbagai langkah kebijakan yang ditempuh dibingkai ke dalam empat pilar berikut ini. Pertama, kebijakan untuk mendorong peran intermediasi perbankan, agar intermediasi dapat berjalan secara lebih efisien dan transparan, serta untuk lebih membuka akses masyarakat kecil terhadap jasa keuangan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah kebijakan mengenai transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta kelanjutan program *financial inclusion*.

Kedua, kebijakan untuk meningkatkan ketahanan perbankan, agar bank tetap kuat dan sehat dalam menghadapi persaingan, melalui pengelolaan yang lebih transparan dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan ini meliputi penyempurnaan perhitungan permodalan agar lebih sesuai dengan risiko, serta mewajibkan bank menerapkan strategi *anti fraud*, prinsip kehati-hatian dalam melakukan alih daya, dan manajemen risiko dalam melakukan layanan nasabah prima.

Ketiga, kebijakan untuk penguatan fungsi pengawasan, yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bank, terutama dalam

2 Untuk protokol koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, sesuai UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21 Tahun 2011 dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

hal kualitas *early warning system*. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait pelaporan bank kepada Bank Indonesia. Sementara itu, untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan bank, Bank Indonesia melalui peraturan “Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan” memberikan batas waktu dalam memberikan tindakan penyehatan bank.

Keempat, penguatan kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan melalui penerapan, yang berdimensi waktu (siklus) maupun dimensi antarsektor (distribusi risiko pada sistem keuangan). Termasuk dalam kebijakan ini adalah kenaikan GWM valuta asing dan GWM LDR.

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan untuk memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang aman dan efisien. Kebijakan ini menjadi semakin penting dalam menghadapi semakin meningkatnya transaksi pembayaran yang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) maupun saluran pembayaran lain seperti kartu kredit, kartu ATM/Debet, dan uang elektronik (*e-money*). Berbagai langkah kebijakan dan pengembangan sistem yang ditempuh oleh Bank Indonesia selama tahun 2011 antara lain (i) standarisasi Kartu ATM/Debet Berbasis *Chip*; (ii) penyempurnaan ketentuan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); (iii) tahapan Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II; (iv) pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway* – NPG); dan (v) peningkatan layanan pengelolaan rekening pemerintah.

Di bidang pengedaran uang, strategi Bank Indonesia sepanjang tahun 2011 diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Kebijakan tersebut terangkum dalam tiga rancangan kebijakan, yaitu (i) peningkatan kualitas uang yang beredar dan pemenuhan permintaan uang sesuai kebutuhan; (ii) peningkatan efisiensi operasional kas di Bank Indonesia dan perbankan; dan (iii) peningkatan layanan kas Bank Indonesia kepada masyarakat dengan mengikutsertakan peran perbankan dan instansi terkait.

Dari sisi Pemerintah, beberapa kebijakan ditempuh baik secara makroekonomi maupun secara sektoral

dalam upaya memperkuat daya dukung perekonomian nasional. Dari sisi makro, kebijakan fiskal yang berhati-hati mampu menjaga kesinambungan operasi keuangan Pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi melalui pemberian stimulus dan peningkatan subsidi. Kinerja fiskal 2011 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tetap terjaga pada tingkat yang aman untuk mendukung sasaran pembangunan nasional. Kinerja tersebut tercermin pada kapasitas fiskal yang semakin membaik karena realisasi penerimaan pajak relatif memenuhi target, bahkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melebihi sasaran anggaran. Sementara itu, penyerapan belanja negara juga membaik sebagaimana tercermin antara lain dari pengeluaran belanja modal yang meningkat cukup signifikan. Kinerja fiskal yang tetap terjaga itu turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan defisit APBN yang mencapai 1,2% dari PDB. Sementara itu, alokasi subsidi yang meningkat juga mendukung ketahanan pangan dan energi, dan menghindarkan tekanan inflasi yang tinggi melalui penundaan implementasi kenaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang melonjak.

Di sisi pengendalian harga, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka pengendalian harga yang sering terganggu oleh permasalahan pasokan. Kedua pihak saling memberi masukan atas kebijakan stabilisasi harga bahan pangan (*volatile foods*) dan kebijakan meminimalkan dampak kebijakan harga yang diatur pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Pemerintah terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sementara itu, secara sektoral kebijakan yang ditempuh Pemerintah terutama ditekankan pada pembenahan struktural guna meningkatkan kapasitas perekonomian khususnya di bidang investasi dan perdagangan luar negeri. Selain itu, kebijakan difokuskan pada sektor lapangan usaha prioritas seperti sektor industri dan pertanian serta sektor strategis lainnya.

Di sisi investasi, kebijakan pemerintah diarahkan pada penyiapan infrastruktur, suprastruktur dan peningkatan iklim investasi. Kebijakan yang dilakukan antara lain perbaikan kepastian hukum berupa reformasi regulasi di tingkat nasional dan daerah; penyederhanaan prosedur berupa penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota; perbaikan logistik nasional

berupa pengembangan Sistem Logistik Nasional untuk menjamin distribusi barang dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur (konektivitas nasional). Pendanaan proyek tersebut berasal dari Pemerintah, BUMN dan swasta melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*). Proyek MP3EI yang digarap meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pengembangan bandara, penambahan armada ferry, pengembangan pelabuhan, pembangunan rel KA, serta proyek jalan tol.

Di sisi perdagangan luar negeri, upaya peningkatan ekspor diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas dan diversifikasi pasar. Strategi yang dilakukan antara lain meningkatkan ekspor nonmigas untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah lebih besar, berbasis pada sumber daya alam, serta permintaan pasarnya yang besar; mendorong ekspor produk kreatif dan jasa terutama yang dihasilkan oleh UKM; mendorong upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor; menitikberatkan upaya perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor nonmigas di kawasan Afrika dan Asia; dan mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.

Di sektor industri, Pemerintah telah menetapkan kebijakan industri nasional dengan pengelompokan (klaster) industri prioritas, yang meliputi: industri agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematik, industri berbasis manufaktur, industri penunjang industri kreatif dan kreatif tertentu, dan industri kecil dan menengah tertentu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi pembangunan sektor industri manufaktur diupayakan melalui langkah-langkah peningkatan daya saing dan kebijakan peningkatan iklim usaha, restrukturisasi permesinan, pengembangan kawasan industri khusus, penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri bahan bakar nabati, dan pengembangan standardisasi industri.

Sejalan dengan itu, Pemerintah melalui PP No.62 yang berlaku sejak tahun 2008 telah memberikan program insentif pajak berupa Bea Masuk Pajak Ditanggung Pemerintah (BMPTD) untuk sektor industri tertentu. Dalam rangka mendorong pengembangan industri

dalam negeri, Pemerintah juga memberikan fasilitas penangguhan dan pengurangan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (*tax holiday*) pada sektor industri pionir³.

Di sektor pertanian, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kebijakan dilakukan melalui strategi peningkatan produktivitas dan kualitas lahan pertanian, bantuan benih dan pupuk, penanganan pascapanen, pendanaan bagi pertanian, pengembangan desa mandiri pangan dan penanganan rawan pangan, serta pembangunan irigasi. Strategi peningkatan produksi pangan tersebut didukung dengan penyempurnaan langkah-langkah koordinasi, monitoring, dan evaluasi cadangan pangan dan penanganan pangan strategis.

Pemerintah juga menempuh sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 adalah menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan itu, Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut antara lain subsidi pangan dalam bentuk beras untuk yang miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan berbagai subsidi lainnya. Kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat serta bantuan sosial bagi masyarakat miskin tersebut dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

PROSPEK EKONOMI

Potensi yang dimiliki perekonomian nasional memberikan optimisme akan prospek ekonomi yang tetap kuat ke depan dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Solidnya perekonomian domestik diperkirakan mampu mendorong ekonomi untuk tetap dapat tumbuh tinggi di tengah melambatnya perekonomian global. Investasi yang diperkirakan terus tumbuh meningkat menjadi pendorong tingginya pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% - 6,7% pada tahun 2012. Meningkatnya pertumbuhan investasi tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, iklim investasi dan peringkat investasi yang

3 PMK No. 130/PMK.011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan PPh Badan yang berlaku sejak 15 Agustus 2011

membalik, potensi pasar yang masih besar, dan suku bunga yang relatif rendah. Selain meningkatkan kapasitas perekonomian, investasi yang meningkat pada gilirannya akan mampu menjaga kekuatan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga juga dapat tumbuh tinggi.

Membbaiknya iklim investasi juga mendorong meningkatnya aliran masuk FDI, dan dengan demikian menyokong surplus NPI pada tahun 2012. Modal portofolio pun diperkirakan masih mengalir masuk karena menariknya imbal hasil, rendahnya persepsi risiko, serta tingginya ekspek likuiditas global. Sementara itu, neraca transaksi berjalan diperkirakan akan mengalami defisit karena tingginya impor sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik di tengah melemahnya pertumbuhan ekspor karena menurunnya kinerja ekonomi global. Namun, secara keseluruhan besarnya nilai surplus transaksi modal dan finansial akan tetap mampu mempertahankan surplus NPI sehingga dapat menjadi faktor pendukung untuk tercapainya stabilitas nilai tukar rupiah pada tahun 2012.

Inflasi pada tahun 2012 diperkirakan dapat terkendali pada kisaran sasarannya. Dengan kondisi ekonomi global yang melambat, harga komoditas global yang cenderung menurun, dan didukung kapasitas produksi domestik yang memadai serta nilai tukar yang stabil, inflasi IHK pada tahun 2012 diperkirakan dapat berada pada kisaran sasarannya di tahun 2012-2013 yaitu 4,5% ± 1%. Prakiraan ini didukung oleh penerapan kebijakan moneter yang pruden dan konsisten oleh Bank Indonesia, disertai penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dari sisi pasokan bahan pokok dan pengendalian harga. Namun, beberapa risiko yang dapat menyebabkan lebih tingginya tekanan inflasi ke depan perlu tetap diwaspadai, khususnya terkait dengan rencana Pemerintah menerapkan kebijakan BBM di tahun 2012.

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2012 diperkirakan tetap terjaga berkat tercapainya stabilitas makroekonomi dan kuatnya fundamental sektor keuangan dalam menyerap risiko. Di sisi perbankan, fungsi intermediasi akan terus membaik dengan pertumbuhan kredit yang tinggi disertai dengan resiko kredit yang tetap terjaga. Meskipun suku bunga akan cenderung menurun, peningkatan efisiensi diperkirakan akan mampu mempertahankan profitabilitas perbankan. Demikian pula, dengan kondisi likuiditas

yang masih akan tetap besar dan permodalan pada tingkat yang cukup tinggi, ketahanan perbankan juga akan tetap terjaga untuk dapat menyerap risiko yang mungkin timbul akibat ketidakpastian perekonomian baik dari global maupun domestik. Di pasar keuangan, volume transaksi diperkirakan akan terus meningkat dengan imbal hasil yang tetap menarik. Emisi saham dan obligasi diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan perekonomian sehingga semakin mendukung proses pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Meskipun persepsi risiko dalam jangka pendek masih akan dipengaruhi oleh penyelesaian krisis di Eropa, minat investor untuk menanamkan dana pada aset keuangan di Indonesia tetap besar dengan masih menariknya imbal hasil, kenaikan peringkat, dan prospek ekonomi yang lebih baik. Lebih dari itu, penguatan Protokol Manajemen Krisis (PMK) oleh Bank Indonesia dan Pemerintah akan menambah keyakinan investor pada pasar keuangan domestik sehingga menjadi landasan terhadap prospek masih kuatnya kinerja dan stabilitas pasar keuangan ke depan.

Dalam jangka menengah, dengan perbaikan struktural yang terus berlangsung, kapasitas dan produktivitas perekonomian yang terus membaik, serta kondisi global yang juga semakin pulih, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh tinggi dan berkesinambungan dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Perekonomian nasional diprakirakan akan tumbuh mencapai 6,6%-7,4% dan inflasi yang semakin menurun dan menuju 4,0%±1% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang tinggi tersebut, didukung oleh perbaikan produktivitas dan kapasitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya investasi, baik investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia. Dari sisi pembiayaan, tingginya investasi tersebut terkait dengan semakin tingginya FDI dan masih tingginya tabungan masyarakat. Sementara itu, kekuatan demografi berupa meningkatnya populasi usia produktif dan perilaku masyarakat yang rasional dalam berkonsumsi akan mendukung akumulasi tabungan masyarakat.

TANTANGAN KE DEPAN

Sejumlah tantangan baik yang berasal dari eksternal maupun domestik dapat memengaruhi optimisme prospek ekonomi Indonesia ke depan. Apabila tidak direspons dengan kebijakan yang tepat dan terukur, sejumlah tantangan tersebut dapat mengganggu

tercapainya prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga.

Dari sisi eksternal, masih rentannya proses pemulihan ekonomi global dapat menyebabkan kinerja yang lebih buruk dari perkiraan awal (*downside risk*). Secara khusus, kompleksitas krisis yang dihadapi Eropa dapat menyebabkan resesi yang lebih dalam di kawasan itu dan menimbulkan dampak rambatan pada kinerja ekonomi global. Eratnya kaitan antara krisis utang pemerintah, kondisi perbankan yang rapuh, dan aktivitas ekonomi yang melambat, dapat memunculkan lingkaran pengaruh buruk (*adverse feedback loop*) yang dapat menyebabkan penyelesaian krisis yang berkepanjangan. Proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat pun diperkirakan masih akan memakan waktu untuk kembali pada tren jangka panjangnya. Melalui jalur perdagangan, risiko penurunan kinerja ekonomi negara-negara maju tersebut dapat berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, melalui jalur keuangan peningkatan ketidakpastian kinerja ekonomi global tersebut dapat menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi pada arus modal asing investasi portofolio ke negara-negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Berbeda dengan arus modal pada periode hingga triwulan II 2011 yang masuk deras dan satu arah, investasi portofolio asing pada tahun 2012 dapat lebih rendah dan cenderung dua arah (*two-ways capital flows*). Tarikan pengaruh antara masih tingginya eksese likuiditas global dan keinginan investor mencari imbal hasil lebih tinggi di *emerging markets* di satu sisi, dengan kemungkinan meningkatnya risiko pemburukan ekonomi di negara-negara maju di sisi lain, dapat memunculkan berita positif atau negatif yang memengaruhi volatilitas arus modal asing tersebut. Hal ini akan menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas di negara *emerging markets* dalam menjaga stabilitas makro dan sistem keuangannya, termasuk di Indonesia.

Dari dalam negeri, salah satu risiko yang dihadapi adalah rencana kebijakan Pemerintah di bidang harga komoditas strategis. Pada APBN tahun 2012 Pemerintah merencanakan akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi roda empat di wilayah Jawa dan Bali, di samping kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar rata-rata 10%. Alternatif lain yang sedang dipertimbangkan Pemerintah adalah menaikkan harga BBM tersebut. Di satu sisi, kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi membengkaknya

anggaran subsidi karena lebih tingginya harga minyak dan pemanfaatannya untuk meningkatkan anggaran bagi belanja modal dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, rencana kebijakan tersebut dapat meningkatkan risiko tekanan inflasi yang lebih tinggi. Kepastian mengenai alternatif dan waktu pelaksanaan terkait kebijakan Pemerintah tersebut akan berpengaruh pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2012.

Dalam stabilisasi nilai tukar rupiah, tantangan yang dihadapi adalah masih relatif besarnya eksese permintaan secara struktural di pasar valuta asing. Selama ini, eksese permintaan valuta asing tersebut dipenuhi oleh arus masuk modal asing, khususnya yang berbentuk investasi portofolio. Kondisi demikian, ditambah dengan belum berkembangnya pasar valuta asing di dalam negeri, menyebabkan rentannya volatilitas nilai tukar rupiah dari kejutan eksternal. Kebijakan Bank Indonesia untuk mewajibkan DHE dan DULN diterima melalui bank devisa di dalam negeri yang mulai berlaku tahun 2012 merupakan langkah mendasar untuk mengatasi permasalahan ini. Kebijakan tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah lanjut untuk pendalaman pasar valuta asing dan kemampuan perbankan untuk memanfaatkan arus devisa masuk dari DHE dan DULN bagi pembiayaan perekonomian.

Tantangan lain dari domestik adalah optimalisasi pemanfaatan eksese likuiditas di perbankan bagi pembiayaan perekonomian. Selama ini, eksese likuiditas tersebut ditempatkan dalam instrumen moneter dan Surat Berharga Negara (SBN). Di samping dari arus masuk modal asing, besarnya eksese likuiditas tersebut berasal dari akumulasi dana yang belum mampu disalurkan perbankan ke sektor riil, baik karena kondisi internal bank maupun daya serap sektor riil. Kondisi demikian menyebabkan tingginya aset industri perbankan saat ini masih belum diikuti secara seimbang dengan peningkatan kontribusinya bagi perekonomian. Eksese likuiditas tersebut merupakan faktor yang mengurangi keterkaitan (*decoupling*) antara sektor perbankan dan sektor riil, yang berdampak pada kurang efektifnya kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Selain masih relatif rendahnya peran perbankan dalam pembiayaan perekonomian, rendahnya efisiensi perbankan merupakan salah satu tantangan yang perlu diupayakan jalan keluarnya. Bank Indonesia senantiasa mengupayakan kondisi perbankan yang tidak saja sehat dan kuat, tapi juga berperan secara

efektif dan efisien dalam pembiayaan perekonomian. Tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah telah memberikan kontribusi pada penetapan suku bunga kredit yang tinggi. Rendahnya tingkat efisiensi tergambar dari rasio beban operasional per pendapatan operasional (BOPO) yang mencapai 85,4% (Oktober 2011). Sebagai perbandingan, rasio BOPO perbankan dikawasan ASEAN berada antara 40%-60%.

Dalam jangka yang lebih panjang, terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan untuk mendukung laju pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan sepertiantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan produksi dan distribusi, terutama bahan pangan. Selain itu tantangan yang perlu diselesaikan adalah meningkatkan daya saing dan daya tahan perekonomian terhadap gangguan yang berasal dari luar negeri (*external shocks*) sehingga dapat menjaga stabilitas dan kinerja makroekonomi. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah mengawal terlaksananya program MP3EI untuk mendukung perbaikan produktivitas serta efisiensi perekonomian guna meningkatkan daya saing dan daya tahan perekonomian.

ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Untuk mendukung tercapainya prospek makroekonomi ke depan, di tengah sejumlah tantangan baik dari eksternal dan domestik di atas, arah kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2012 akan difokuskan pada 5 (lima) hal sebagai berikut: Pertama, mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi, mendorong kapasitas perekonomian sekaligus memitigasi risiko perlambatan ekonomi global. Dalam hal ini, kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian. Respons suku bunga akan diarahkan agar konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi IHK sebesar $4,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2012 dan 2013. Dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi ini, respons suku bunga tersebut juga dimaksudkan untuk sekaligus memberikan stimulus pada ekonomi domestik guna memitigasi risiko perlambatan ekonomi global. Kebijakan suku bunga ini akan dilengkapi dengan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas perekonomian maupun untuk pengendalian kredit perbankan khususnya pada sektor-sektor konsumtif tertentu yang cenderung tumbuh berlebihan dan menimbulkan kerentanan.

Sementara terkait nilai tukar, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memberikan kepastian usaha bagi seluruh pelaku ekonomi. Stabilitas nilai tukar tersebut diupayakan dicapai dengan memperhatikan pencapaian keseimbangan internal dan eksternal perekonomian. Mulai Januari 2012, kebijakan stabilisasi nilai tukar akan didukung oleh implementasi kebijakan kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa utang luar negeri (DULN) di bank domestik. Bank Indonesia juga tengah melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperkaya instrumen di pasar valas yang dapat digunakan sebagai alat lindung nilai (*hedging*).

Kedua, meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian, dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perbankan, kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) akan dilanjutkan. Hal tersebut untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai. Sebagai tindak lanjut dari sisi pengawasan bank, pelaksanaan (*enforcement*) ketentuan yang mewajibkan Rencana Bisnis Bank (RBB) mencantumkan target-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar akan ditingkatkan. Selain itu, kebijakan peningkatan permodalan akan terus dilanjutkan untuk mendukung penguatan ketahanan perbankan. Hal tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan dan mengantisipasi perubahan siklus bisnis.

Bank Indonesia melihat aspek perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan juga merupakan dua aspek yang perlu memperoleh perhatian. Beberapa kasus penipuan (*fraud*) di perbankan yang menyita perhatian pada tahun 2011, memerlukan penataan kembali kebijakan terkait dengan kedua aspek di tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan untuk menyempurnakan aspek perlindungan nasabah dan calon nasabah. Lebih lanjut, untuk peningkatan kualitas tata kelola perbankan, Bank Indonesia akan menyempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan, khususnya yang terkait laporan keuangan publikasi, dan pengaturan terhadap akuntan publik yang digunakan oleh perbankan. Bank Indonesia juga terus mengkaji kebijakan kepemilikan di perbankan dan kebijakan *multi-license* seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.

Ketiga, meningkatkan efisiensi, kehandalan, dan keamanan sistem pembayaran, baik dalam sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri melalui sejumlah upaya, antara lain: (i) peningkatan keamanan dan kehandalan penyelenggaraan jasa pembayaran melalui penerapan mitigasi risiko termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi, penguatan kerangka hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan peran industri jasa pembayaran nasional; (ii) peningkatan efisiensi penyelenggaraan jasa pembayaran nasional, termasuk mendorong terciptanya interoperabilitas dan interkoneksi di antara berbagai penyelenggara jasa pembayaran; dan (iii) peningkatan perlindungan konsumen melalui peningkatan transparansi oleh pelaku jasa pembayaran, serta penguatan pengaturan perlindungan konsumen.

Keempat, memperkuat ketahanan makro dengan memantapkan koordinasi dalam manajemen pencegahan dan penanganan krisis (PMK) serta melanjutkan penguatan koordinasi kebijakan dengan instansi terkait, baik dalam pengendalian stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan maupun sistem pembayaran. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam hal pengendalian inflasi untuk meminimalkan dampak inflasi dari kenaikan harga bahan pangan (*volatile food*) dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada meningkatnya harga barang dan jasa (*administered price*) akan terus diperkuat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjamin keselarasan kebijakan yang ditempuh. Untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, koordinasi otoritas moneter dengan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI), baik di tingkat pusat dan daerah akan terus diperkuat.

Kelima, mendukung pemberdayaan sektor riil termasuk melanjutkan upaya perluasan akses perbankan (*financial inclusion*) kepada masyarakat. Hal ini

dikhususkan pada layanan perbankan bagi masyarakat pedesaan berbiaya rendah, termasuk peningkatan kualitas Program Tabunganku, pengembangan edukasi keuangan, pelaksanaan *Financial Identity Number* dan pelaksanaan survei literasi. Untuk pemberdayaan sektor riil, Bank Indonesia akan memfasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Terkait dengan kebutuhan pembiayaan sektor-sektor yang secara komersial tidak diminati oleh perbankan namun memiliki peran strategis dalam perekonomian, Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah akan mengembangkan berbagai skim pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia juga akan melakukan pengembangan produk dan aktivitas perbankan syariah. Strategi pengembangan BPRS ke depan diarahkan sesuai dengan karakteristik BPRS sebagai *community bank* yang sehat, kuat, produktif, serta fokus pada penyediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM dan masyarakat setempat di daerah.

Bank Indonesia menyadari bahwa kompleksitas tantangan dan efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mendukung perekonomian nasional tersebut memerlukan koordinasi yang erat dengan kebijakan Pemerintah serta dukungan perbankan, pengusaha dan masyarakat luas. Untuk itu, koordinasi kebijakan yang selama ini telah berjalan baik dengan instansi terkait akan terus diperkuat, baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, pengendalian inflasi, pendalaman pasar keuangan, maupun dalam mendorong sektor riil. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan fungsi Kantor Bank Indonesia (KBI) untuk mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pembangunan di daerah melalui jaringan hubungan yang erat dengan Pemerintah Daerah.

Inflasi tahun 2011 berhasil ditekan sehingga berada pada level 3,79%, jauh lebih rendah dari inflasi tahun 2010 sebesar 6,96%. Angka ini berada di bawah kisaran sasaran inflasi 5%±1% sehingga diharapkan membantu mempercepat proses disinflasi menuju sasaran jangka panjang yang lebih rendah, setara dengan tingkat inflasi negara-negara kawasan Asia. Realisasi tingkat inflasi yang rendah tersebut dicapai dalam kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat menjadi 6,5% pada tahun 2011 dari 6,1% yang dicapai tahun 2010.

Penurunan inflasi tersebut didukung oleh terjaganya inflasi inti pada level yang rendah, inflasi bahan pangan yang menurun tajam, dan inflasi administered prices yang terjaga pada level yang minimal. Inflasi inti cukup stabil pada tingkat yang relatif rendah yaitu 4,34%¹. Angka ini lebih rendah dari rata-rata historisnya sekitar 6,5%². Sementara itu, laju inflasi bahan pangan hanya tercatat sebesar 3,37%, jauh lebih rendah dari rata-rata historisnya sekitar 8,0%³. Minimalnya kebijakan Pemerintah terkait harga komoditas strategis membantu inflasi *administered prices* terjaga pada level yang rendah dan terkendali sebesar 2,78%.

Pencapaian tingkat inflasi yang rendah tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah yang dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengatasi dinamika permasalahan yang menjadi sumber tekanan inflasi. Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2011 tekanan inflasi meningkat, terutama karena kenaikan harga bahan pangan domestik yang disebabkan oleh terganggunya pasokan dan distribusi serta kurang kondusifnya iklim, yang disertai dengan tingginya ekspektasi inflasi. Kondisi

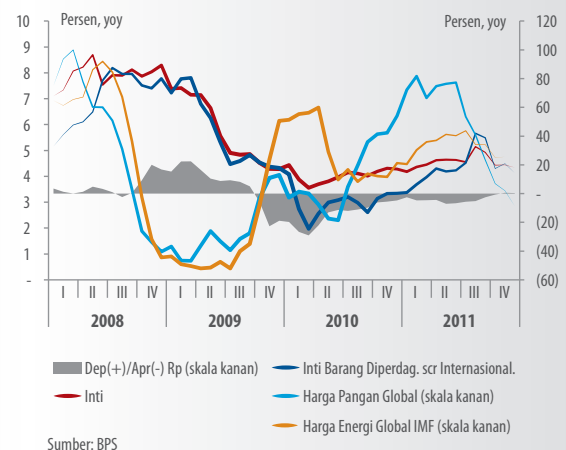
1 Apabila pengaruh harga emas perhiasan dikeluarkan, inflasi inti bahkan mengalami penurunan dari 4,05% tahun 2010 menjadi 3,84% pada tahun 2011. Sebagai informasi, harga emas domestik lebih banyak dipengaruhi oleh harga emas dunia yang meningkat sangat tajam pada periode laporan.

2 Rata-rata 2001-2011 dengan mengeluarkan pengaruh kenaikan BBM.

3 Ibid.

tersebut juga diperburuk oleh faktor global yang kurang mendukung, terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas global. Pada saat bersamaan, di pasar keuangan dasarnya aliran masuk modal asing semakin menambah eksekutif likuiditas perbankan yang berpotensi menambah tekanan inflasi.

Menghadapi tantangan di atas, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang diarahkan untuk menurunkan tekanan inflasi menuju sasaran inflasi yang ditetapkan dengan mengelola ekspektasi inflasi, aliran modal asing, dan eksekutif likuiditas domestik. Menghadapi tingginya tekanan inflasi sebagaimana tercermin dari ekspektasi inflasi yang mendekati 7% pada triwulan I 2011, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 bps sehingga menjadi 6,75% dan tetap mempertahankannya hingga Agustus 2011. Untuk memperkuat upaya penurunan inflasi, Bank Indonesia juga membuka ruang yang lebih besar bagi penguatan nilai tukar rupiah seiring dengan dasarnya aliran masuk modal asing dan kecenderungan penguatan nilai tukar negara-negara kawasan Asia. Kebijakan tersebut mampu memitigasi dampak tingginya harga komoditas global terhadap inflasi di dalam negeri (*imported inflation*), sebagaimana tercermin pada tetap terkendalnya inflasi inti (Grafik 1). Penguatan nilai tukar Rupiah tersebut juga mendorong kegiatan



Grafik 1. Nilai Tukar dan Inflasi Inti

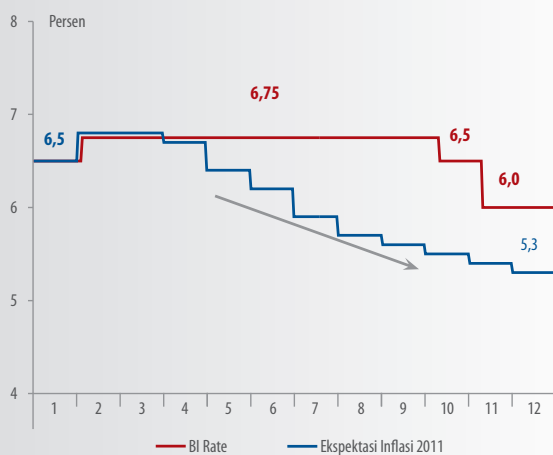
impor, terutama untuk peningkatan produksi, investasi dan pasokan pangan, sehingga membantu mengatasi tekanan inflasi karena terganggunya pasokan dan distribusi barang dan jasa.

Di samping itu, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan untuk pengelolaan aliran modal asing yang telah ditempuh tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar derasnya aliran masuk modal asing, khususnya yang berjangka pendek dan cenderung spekulatif, tidak menimbulkan dampak yang berlebihan pada penguatan nilai tukar rupiah, eksekusi likuiditas domestik, dan peningkatan risiko instabilitas di pasar keuangan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia memberlakukan pembatasan posisi harian pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan sebesar maksimum 30% dari modal bank pada Januari 2011, menaikkan GWM valuta asing dari sebelumnya 1% menjadi 5% pada bulan Maret 2011 dan kemudian menjadi 8% pada bulan Juni 2011, serta memperpanjang masa endap kepemilikan SBI dari sebelumnya minimum 1 bulan menjadi minimum 6 bulan (*six months holding period*) pada Mei 2011. Dari sisi pengendalian likuiditas, di samping kenaikan GWM Rupiah menjadi 8% yang diterapkan pada tahun 2010, Bank Indonesia juga terus memperkuat operasi moneter antara lain berupa perpanjangan profil jatuh waktu instrumen moneter dan pembatasan penawaran SBI di pasar primer. Berbagai bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar rupiah, dan makroprudensial untuk pengelolaan aliran modal asing dan pengendalian likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia tersebut mampu menurunkan tekanan

inflasi secara signifikan, sebagaimana tercermin dari menurunnya ekspektasi inflasi secara tajam menjadi sekitar 5% di penghujung tahun 2011 dari mendekati 7% pada awal tahun 2011 (Grafik 2).

Dalam triwulan III 2011, memburuknya krisis Eropa dan melemahnya pemulihan ekonomi global membawa perubahan pada dinamika perekonomian nasional. Di pasar keuangan, di samping penurunan harga saham dan obligasi, pembalikan aliran modal asing telah menyebabkan tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang apabila tidak dilakukan langkah-langkah stabilisasi dapat menyebabkan tekanan inflasi dan instabilitas sistem keuangan. Pada saat bersamaan, menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia dapat menyebabkan akan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia kemudian mulai menempuh kebijakan moneter yang cenderung akomodatif. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tekanan inflasi telah mereda dan akan tetap rendah pada kisaran sasarannya, sementara terdapat pertimbangan untuk menempuh kebijakan moneter yang *countercyclical* dalam rangka memitigasi dampak pelemahan ekonomi global pada pertumbuhan ekonomi nasional (Diagram 1).

Dengan pertimbangan di atas, Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan penurunan BI Rate pada Oktober dan November 2011 masing-masing sebesar 25 bps dan 50 bps sehingga menjadi 6%. Sinyal kebijakan moneter yang akomodatif juga dilakukan dengan menurunkan batas bawah koridor operasi moneter (*deposit facility*) dari sebelumnya 100 bps menjadi 150 bps di bawah BI Rate pada September 2011. Sementara itu, untuk menjaga agar tekanan pelemahan rupiah akibat derasnya pembalikan modal asing tidak menyebabkan tekanan inflasi dan instabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia terus melakukan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing dengan memanfaatkan akumulasi cadangan devisa pada periode sebelumnya. Kebijakan ini juga dibarengi dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk mengatasi tekanan rupiah dari pelepasan SBN oleh investor asing, mendukung pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah, dan sekaligus peningkatan SBN sebagai instrumen moneter. Lebih dari itu, untuk memperkuat secara struktural



Grafik 2. Ekspektasi Inflasi dan BI rate

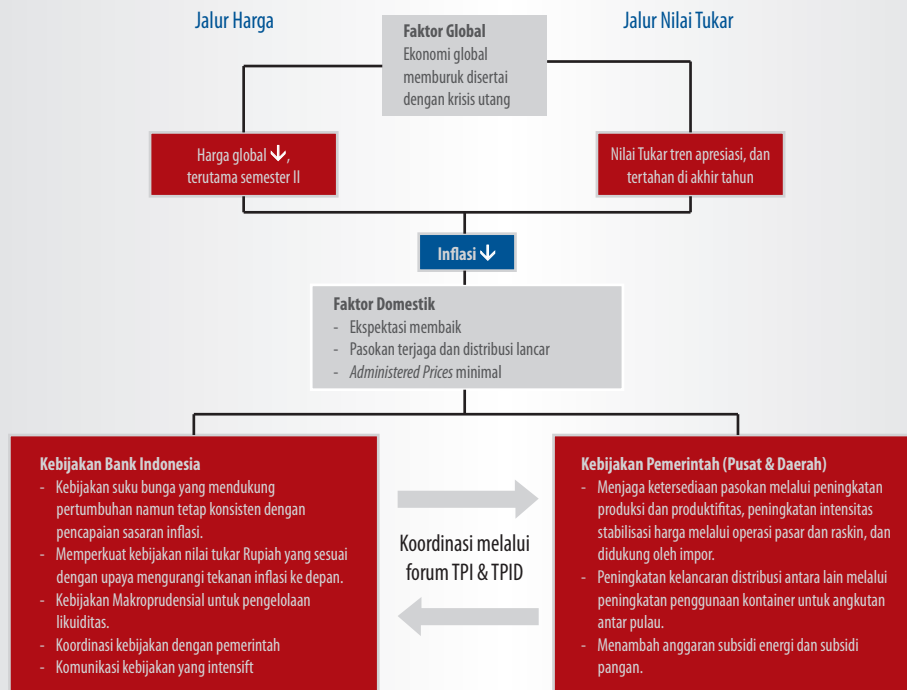


Diagram 1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Inflasi Tahun 2011

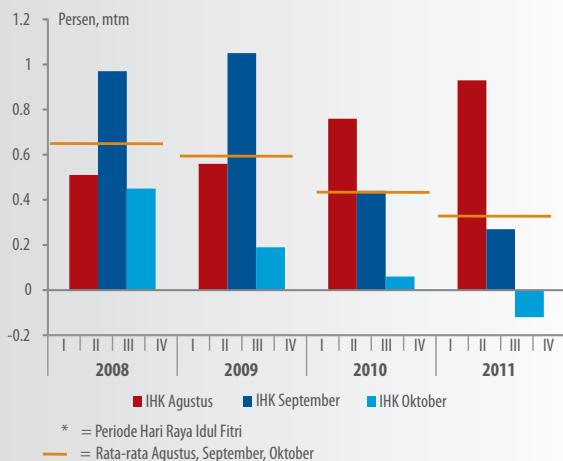
pasokan devisa di pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia menempuh kebijakan yang mewajibkan penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan penarikan devisa utang luar negeri (DULN) melalui perbankan devisa di dalam negeri.

Sementara itu, kebijakan Pemerintah diarahkan untuk mengatasi tekanan inflasi yang berasal dari keterbatasan pasokan dan hambatan distribusi, khususnya bahan pangan dan energi. Untuk mendukung kecukupan pasokan domestik, berbagai langkah kebijakan telah ditempuh antara lain pemberian subsidi bagi pengadaan benih dan pupuk, penyediaan anggaran cadangan benih nasional dan bantuan langsung benih unggul serta perbaikan distribusi dan struktur pasar. Karena upaya tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan domestik maka Pemerintah menambah pasokan dari impor khususnya beras dan bumbu-bumbuan yang harganya melonjak pada awal tahun 2011. Langkah stabilisasi harga lain yang dilakukan adalah penyelenggaraan operasi pasar di beberapa daerah hingga mencapai 400.305 ton pada tahun 2011, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 46,047 ton. Intensifnya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan

bagi masyarakat juga didukung oleh penyaluran raskin hingga 13 kali pada tahun 2011. Dengan upaya upaya tersebut, inflasi kelompok bahan makanan (volatile food) mengalami penurunan cukup tajam dari 17,74% pada tahun 2010 menjadi 3,37% pada tahun 2011. Keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pasokan dan distribusi juga tercermin dari inflasi pada periode Hari Raya yang jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya (Grafik 3).

Di samping langkah-langkah tersebut, Pemerintah dalam tahun laporan juga mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memberikan subsidi dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas energi. Terkait subsidi komoditas energi, anggaran meningkat dari Rp139,9 triliun (2010) menjadi Rp255,6 triliun (2011). Kebijakan ini dilakukan karena adanya penundaan implementasi kenaikan harga BBM bersubsidi maupun pembatasan BBM bersubsidi di tahun 2011. Sejalan dengan langkah ini, inflasi kelompok *administered prices* dapat ditekan pada level yang rendah yaitu 2,78% pada tahun 2011.

Terkendalnya inflasi pada tingkat yang rendah pada tahun 2011 juga merupakan hasil eratnya



Grafik 3. Perkembangan Inflasi IHK Periode Hari Raya

koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam implementasinya, koordinasi dimaksud dilakukan melalui berbagai forum, khususnya Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerah semakin nyata dan kuat, antara lain tercermin

dari terus bertambahnya jumlah TPID dari 38 TPID di tahun 2010 menjadi 65 TPID pada akhir 2011. Sementara itu untuk menjembatani peran TPI dan TPID, pada Juli 2011 Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID dibentuk yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Pembentukan Pokjanas tersebut merupakan salah satu tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TPI dan TPID yang dibuka oleh Wakil Presiden RI pada Februari 2011. Fungsi Pokjanas diarahkan untuk meningkatkan efektivitas upaya pengendalian inflasi di daerah melalui koordinasi yang lebih kuat antara Pusat dan Daerah dalam menghadapi beberapa risiko tekanan inflasi ke depan, khususnya yang bersumber dari kelompok komoditas energi dan pangan. Beberapa agenda langkah ke depan termasuk penguatan kelembagaan dan koordinasi TPI dan TPID baik di lingkup daerah, antar daerah maupun antara daerah dengan pusat, pengembangan sistem informasi harga komoditas strategis secara nasional, serta beberapa kegiatan terkait dengan penguatan ketahanan pangan.

